



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 415/KEP/HK/2021**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018-2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

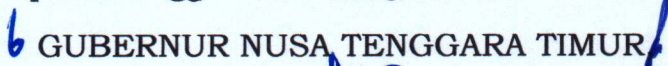
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 722, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
  - b. peta sub proses;
  - c. peta relasi; dan
  - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 DESEMBER 2021

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

## KATA PENGANTAR

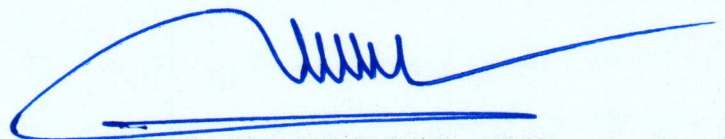
Segala Puji, Hormat dan Syukur hanya kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan untuk memulai dan menyelesaikan Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023.

Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023 dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 25 November 2021

**KEPALA DINAS,**



**Lecky Fredrich Koli, STP**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.196402101986031029

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 .....	1
A. Visi .....	1
B. Misi .....	1
C. Tujuan .....	1
D. Sasaran .....	1
II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Prov. NTT .....	2
III. Telahaan Peran serta dan Keterlibatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT dalam mensukseskan Visi misi Kepala Daerah .....	4
IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT .....	7
V. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	11
VI. Peta Proses Bisnis Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	12
A. Peta Proses .....	12
B. Peta Sub Proses	
1. DISTANKP.01. Peningkatan Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura .....	14
2. DISTANKP.02. Peningkatan Produksi Tanaman Pkebunan .....	15
3. DISTANKP.03. Peningkatan Sarana dan Pasarana Pertanian .....	16
4. DISTANKP.04. Ketahanan Pangan dan Penyuluhan .....	17
5. DISTANKP.05. Pengelolaan dan Pengembangan SDM .....	18
6. DISTANKP.06. Pengelolaan data dan Teknologi Informasi .....	19
7. DISTANKP.07. Perencanaan dan Fungsi Keuangan .....	20
8. DISTANKP.08. Pengawasan Internal .....	21
9. DISTANKP.09. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	22
C. Peta Relasi .....	23
D. Peta Lintas Fungsi .....	24
1. DISTANKP.01.01.a. Peningkatan Produksi Serealia .....	24
2. DISTANKP.01.01.b. Tanam Jagung Panen Sapi .....	25

3. DISTANKP.01.2. Peningkatan Produksi Kacang-Kacangan .....	26
4. DISTANKP.01.3. Peningkatan Produksi Hortikultura .....	27
5. DISTANKP.02.1. Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan .....	28
6. DISTANKP.02.2. Peningkatan Produksi Tanaman Semusim .....	29
7. DISTANKP.02.3. Peningkatan Produksi Tanaman Rempah Dan Penyegar .....	30
8. DISTANKP.03.1. Pengelolaan Lahan dan Air .....	31
9. DISTANKP.03.2. Pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alsintan .....	32
10. DISTANKP.03.3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian .....	33
11. DISTANKP.04.1. Ketersediaan dan Distribusi Pangan .....	34
12. DISTANKP.04.2. Konsumsi dan Keamanan Pangan .....	35
13. DISTANKP.04.3. Penyuluhan .....	36
14. DISTANKP.05.1. Perencanaan dan Formasi pegawai.....	37
15. DISTANKP.05.2. Penilaian Prestasi Kerja .....	38
16. DISTANKP.05.3. Kenaikan Pangkat / Pensiun ASN .....	39
17. DISTANKP.05.4. Disiplin Pegawai .....	40
18. DISTANKP.06.1. Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan .....	41
19. DISTANKP.06.2. Pengelolaan Website .....	42
20. DISTANKP.06.3. Pengelolaan Aplikasi Persuratan .....	43
21. DISTANKP.07.1. Perencanaan .....	44
22. DISTANKP.07.2. Penatausahaan Keuangan .....	45
23. DISTANKP.08.1. Pelaksanaan SPIP .....	46
24. DISTANKP.09.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	47

- e. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
- f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- g. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
- h. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
- i. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
- j. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
- k. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
- l. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
- m. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

## II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
			4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua Penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan 3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel,

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
	pelayanan publik	bebas dan bersih KKN	transparan dan partisipati

### III. Telaahan Peran Serta Dan Keterlibatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Untuk mencapai Visi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT makasalah satu misi yang diusung adalah mewujudkan “NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera” berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable development*). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT melaksanakan Misi ke; **Misi 1:** Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*stakeholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan. **Misi 2:** Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*). NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan pembangunan sektor pariwisata, karena itu misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

Dalam kaitan dengan misi tersebut maka Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air/irigasi, lahan-lahan tidur yang selama ini tidak produktif, permasalahan pemasaran dan kelangkaan pupuk. Dari hasil pemetaan dan analisis lingkungan strategis internal maupun lingkungan strategis eksternal maka dapat teridentifikasi permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan pertanian yaitu :

#### 1. Lingkungan Strategis

##### a. Lingkungan Strategis Eksternal Berupa Tantangan

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan : kondisi produktivitas pertanian primer di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkan aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.
- 2) Meingkatnya permintaan akan produk pertanian berkualitas secara kontinyu.
- 3) Pengelolaan lahan tidur potensial yang belum dilaksanakan dengan baik.
- 4) Perbaikan teknik budidaya untuk menjamin peningkatan produksi, kualitas produksi dan keberlanjutan usaha pertanian.
- 5) Mekanisme peredaran pupuk bersubsidi yang panjang mengakibatkan adanya kelangkaan pupuk, pupuk tidak tepat jumlah dan lokasi.
- 6) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan : Saat ini kondisi infrastruktur lahan dan air pertanian belum optimal. Infrastruktur lainnya yaitu benih juga masih kurang, laboratorium sertifikasi dan pengujian mutu, balai benih, kebun benih maupun kebun induk belum tersebar merata di semua kabupaten.
- 7) Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga

rendah : Usaha pertanian rakyat masih berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pedesaan.

- 8) Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan : kelembagaan usaha kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata.
- 9) Sistem penyuluhan pertanian yang efektif : Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan selain itu luas wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal.

b. Lingkungan Strategis Internal Berupa Kelemahan

- 1) Tingkat kedisiplinan dan kualitas SDM (pegawai) yang relatif rendah.
- 2) Masih lemahnya pengawasan melekat atasan terhadap bawahan.
- 3) Belum terbangunnya secara optimal sistem koordinasi yang terpadu baik antar lembaga maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah mulai dari aspek perencanaan sampai dengan aspek monitoring dan evaluasi.

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode Tahun 2018 -2023 adalah :

1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian
2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
4. Pengembangan Tanaman Lokal spesifik
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian
7. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal
8. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan, Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan
9. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan
10. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan penganekaragaman pangan

#### **IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

1. Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yakni
  1. Tugas :

Membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  2. Fungsi :
    1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan KetahananPangan;
    2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
    3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
    4. Pembinaan unit pelaksana teknis;
    5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan sarana dan prasarana serta rumah tangga;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Landasan Hukum Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

3. Rumusan Tugas

Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi kesekretariatan, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan, kecukupan dan aksesibilitas pangan, konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

4. Sistem, Prosedur dan Mekanisme Tata Kerja

Sistem, prosedur dan mekanisme tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT meliputi kegiatan yang bersifat pelayanan kepada publik dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Benih berupa sertifikasi benih tanaman pangan, penerbitan Surat Keterangan Pedagang Benih (SKPB), sertifikasi benih tanaman perkebunan dan pelayanan penyediaan Bio Pestisida, Ijin Usaha Perkebunan serta Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Dalam menunjang kinerja pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, kepala dinas dibantu oleh bidang-bidang meliputi : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bidang Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Masing-masing bidang

dipimpin oleh seorang kepala bidang yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Seksi – seksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada langsung dibawah Gubernur Nusa Tenggara Timur dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Adapun profil Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

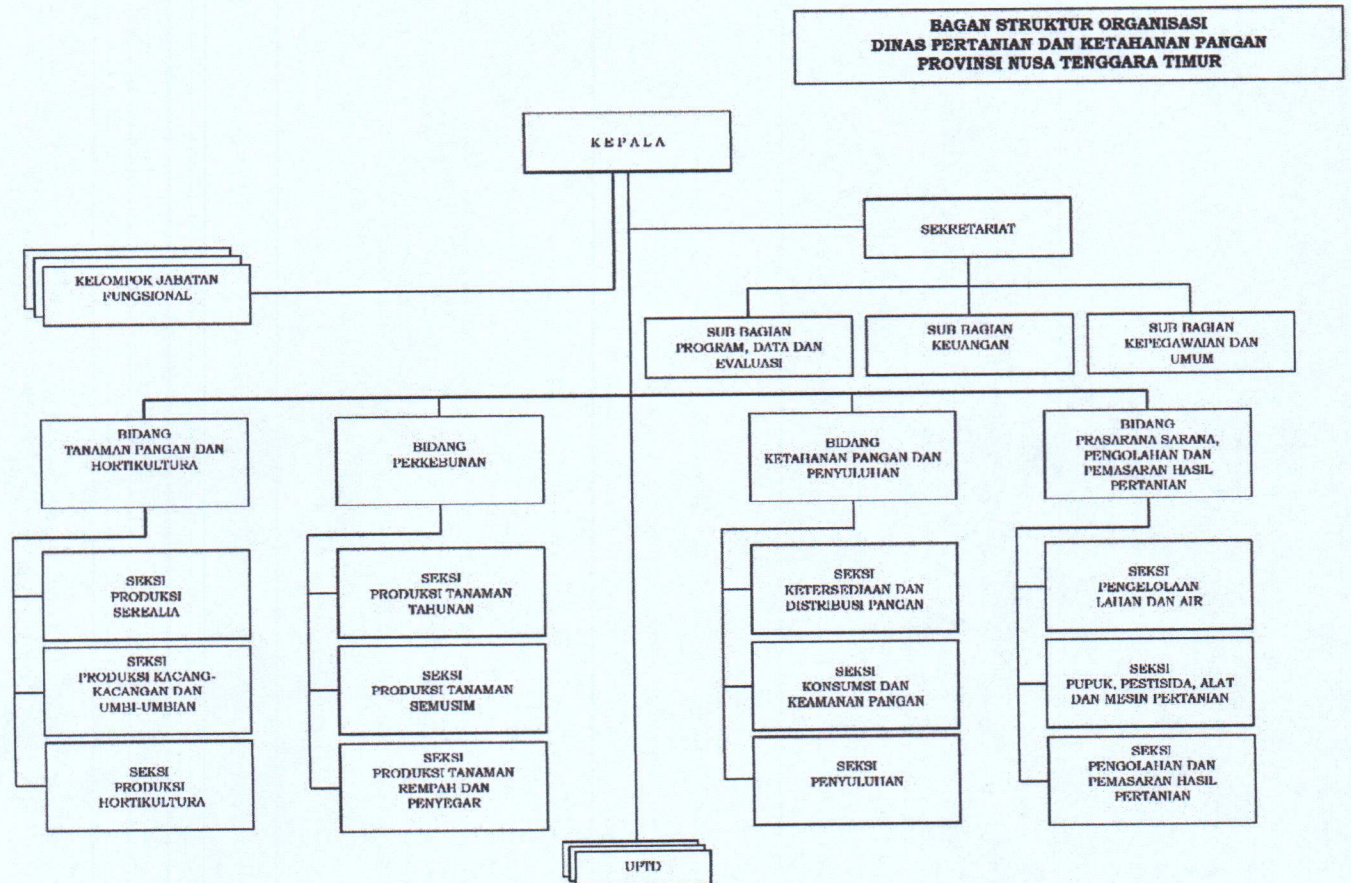
- a. Kepala Dinas yang membawahi :
  1. Sekretariat Dinas;
  2. Bidang - Bidang;
  3. Unit Pelaksana Teknis;
  4. Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
  1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. Bidang Perkebunan;
  3. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
  4. Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
  1. Seksi Produksi Serealia;
  2. Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
  3. Seksi Produksi Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan terdiri atas :
  1. Seksi Produksi Tanaman Tahunan;

2. Seksi Produksi Tanaman Semusim; dan
  3. Seksi Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar.
- f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :
1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  3. Seksi Penyuluhan.
- g. Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri atas :
1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
  2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud adalah merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Adapun Profil Organisasi UPT tersebut sebagai berikut;
1. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang terdiri dari :
    - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Seksi Pengujian Mutu benih; dan
    - c) Seksi Pengawasan Mutu Benih.
  2. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
    - c) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman.
  3. Kepala UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura; dan
    4. Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Pangan.
  4. Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium

HayatiPerkebunan terdiri atas :

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Seksi Pengolahan Laboratorium dan Biopestisida; dan
- c) Seksi Produksi Benih dan Pengolahan Kebun Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan tergambar dalam Struktur Organisasi (Gambar 1) di bawah ini :

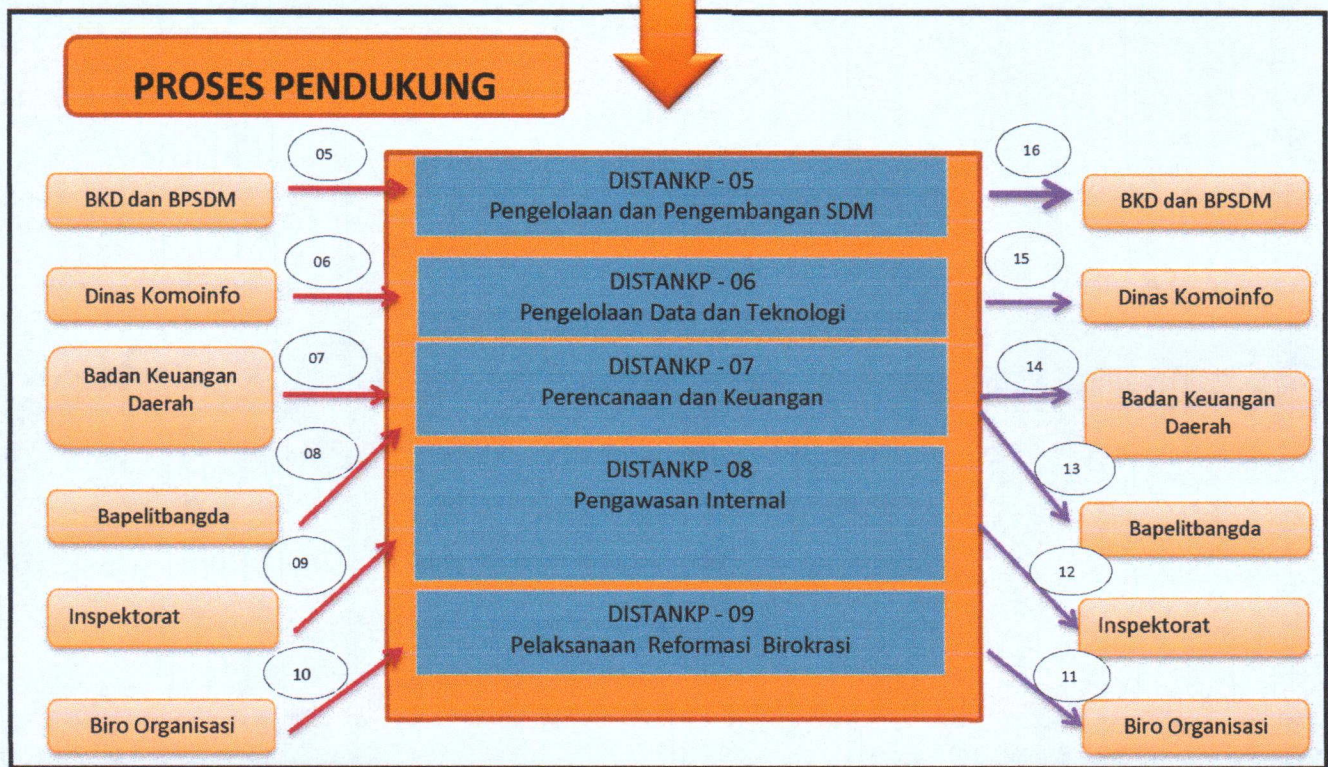
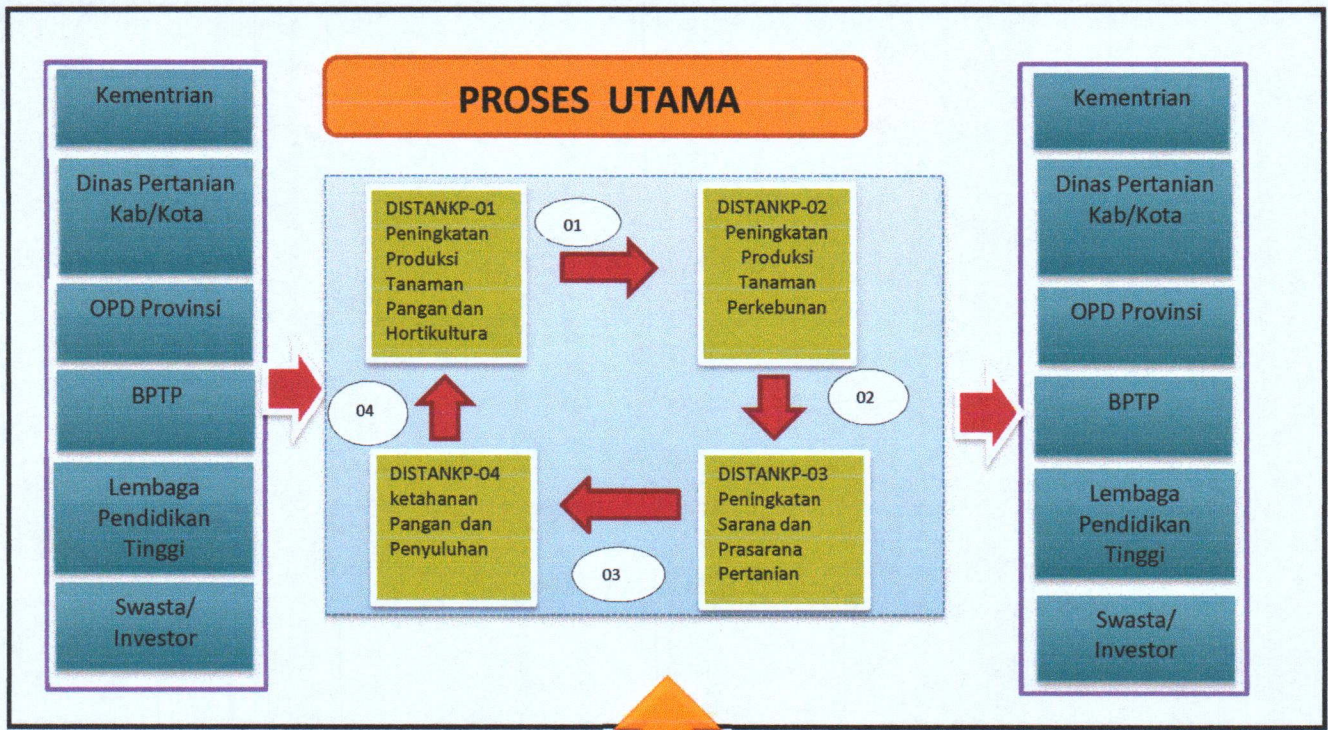


## V. Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### A. PETA PROSES BISNIS

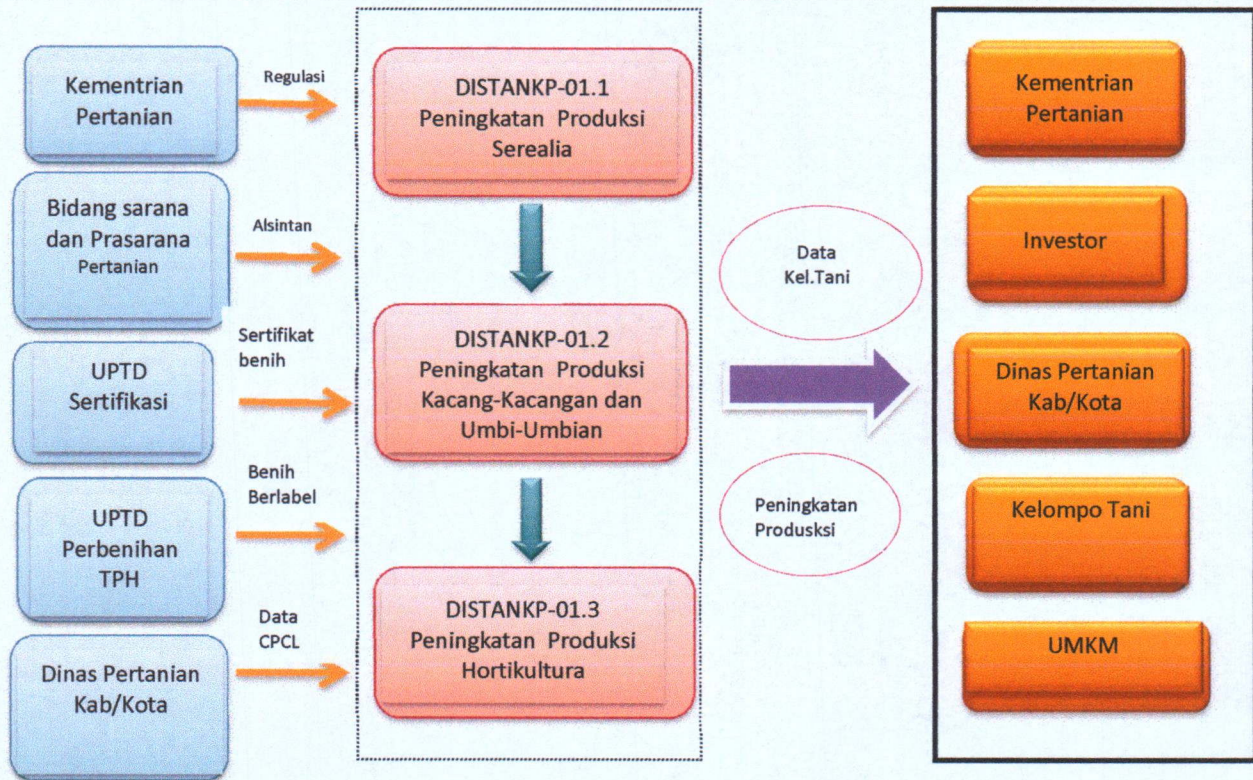
Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama.

Peta Proses Bisnis pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :

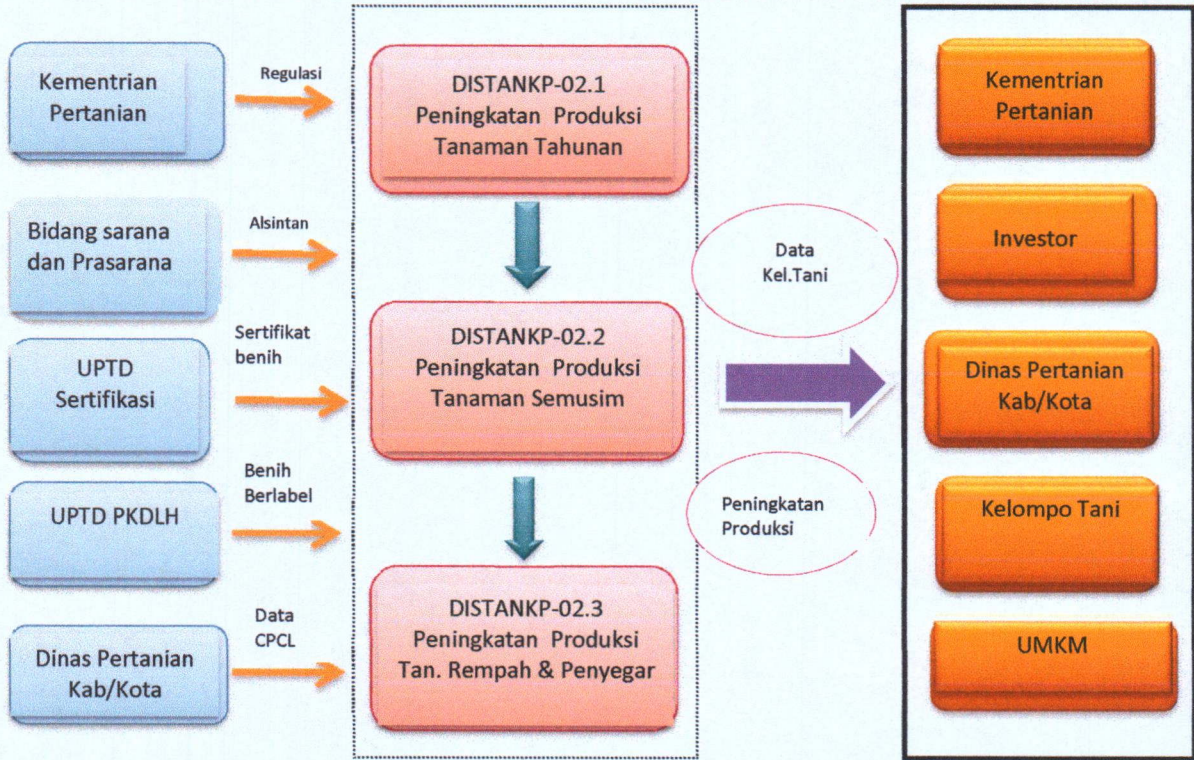


## B. PETA SUB PROSES

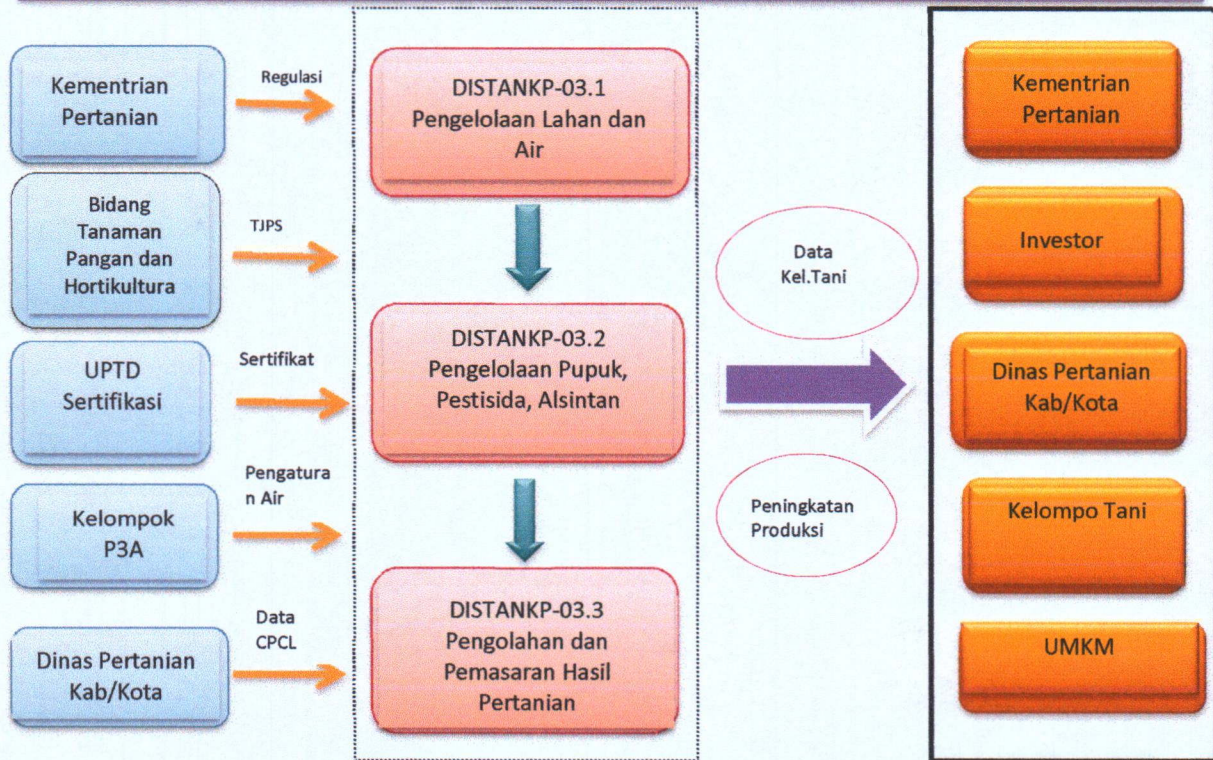
### PETA SUB PROSES DISTANKP-01. PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



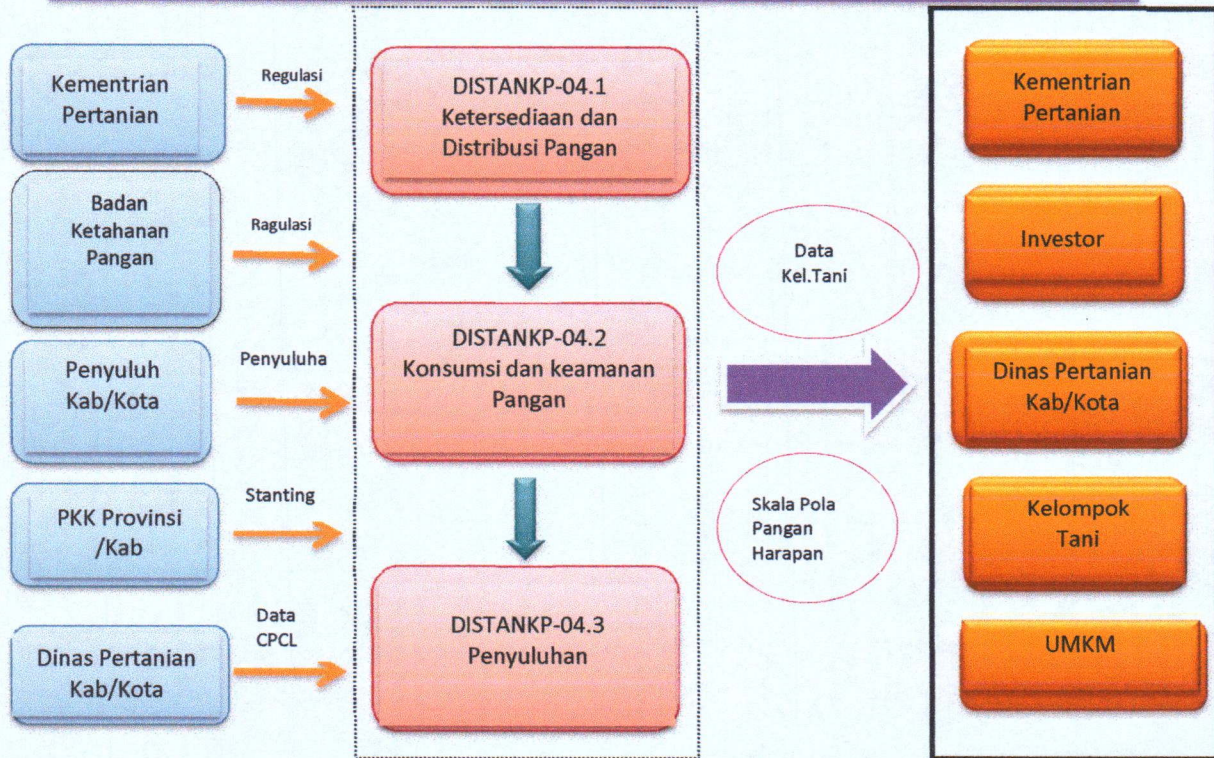
# PETA SUB PROSES DISTANKP - 02. PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN



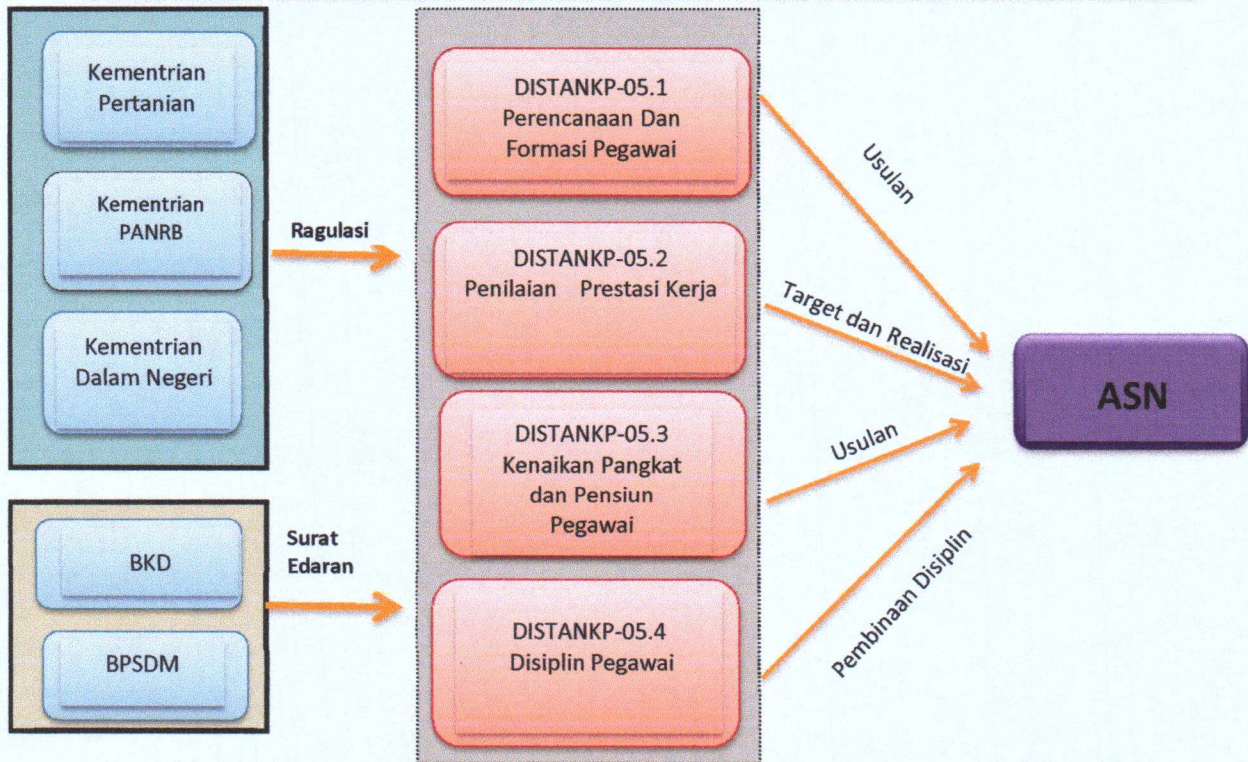
## PETA SUB PROSES DISTANKP - 03. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN



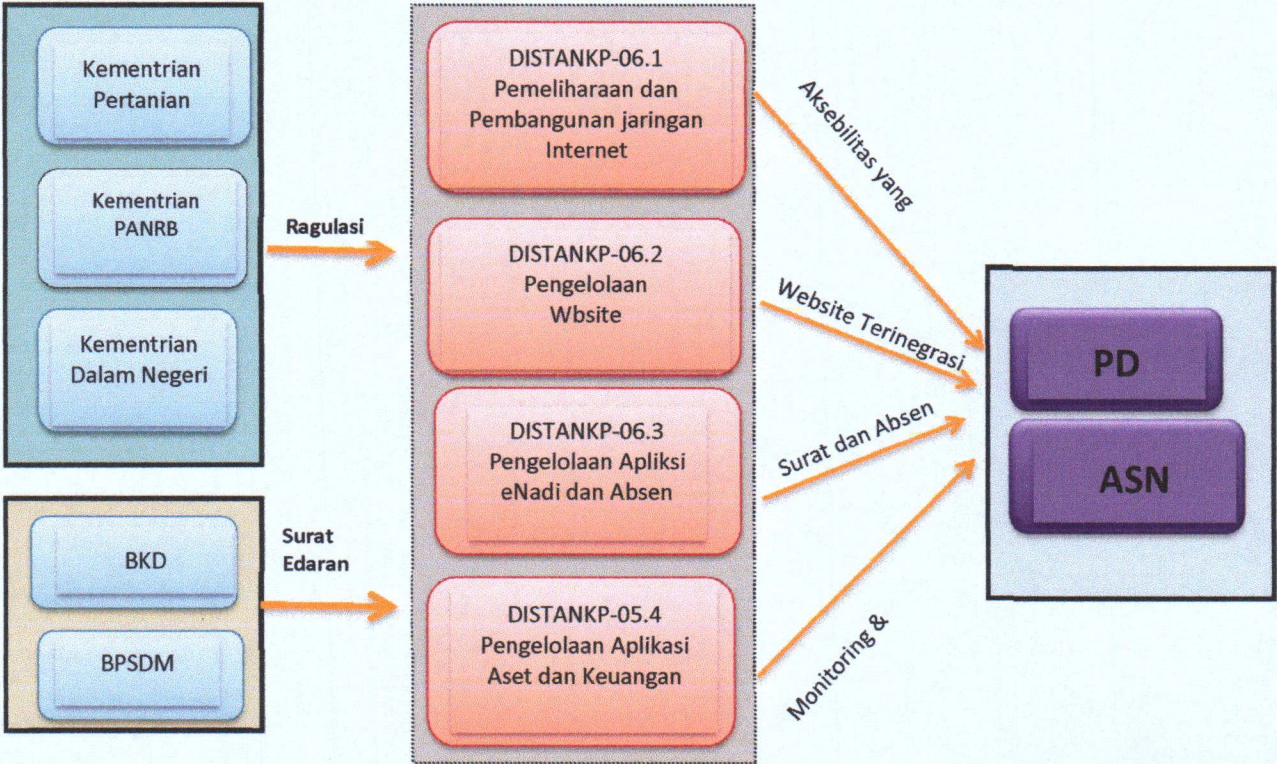
## PETA SUB PROSES DISTANKP - 04. KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN



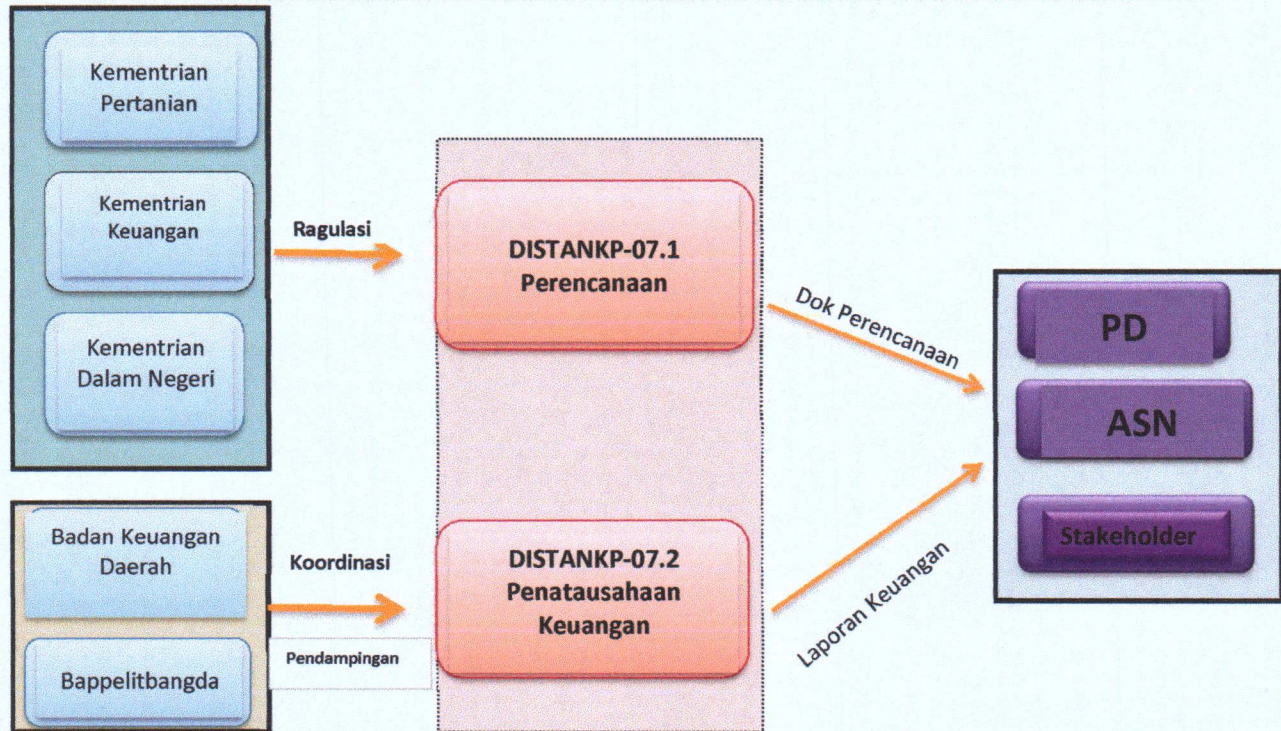
**PETA SUB PROSES**  
**DISTANKP - 05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**



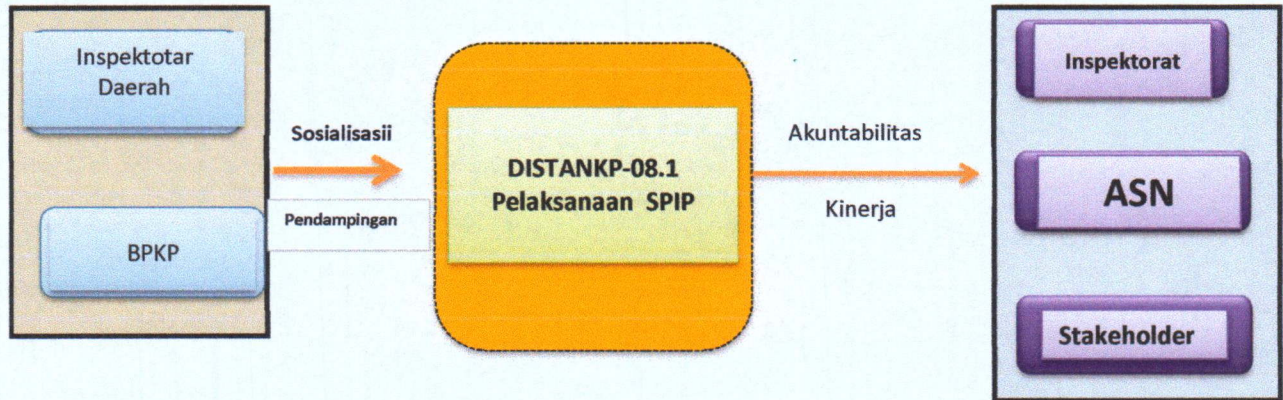
**PETA SUB PROSES**  
**DISTANKP - 06. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**



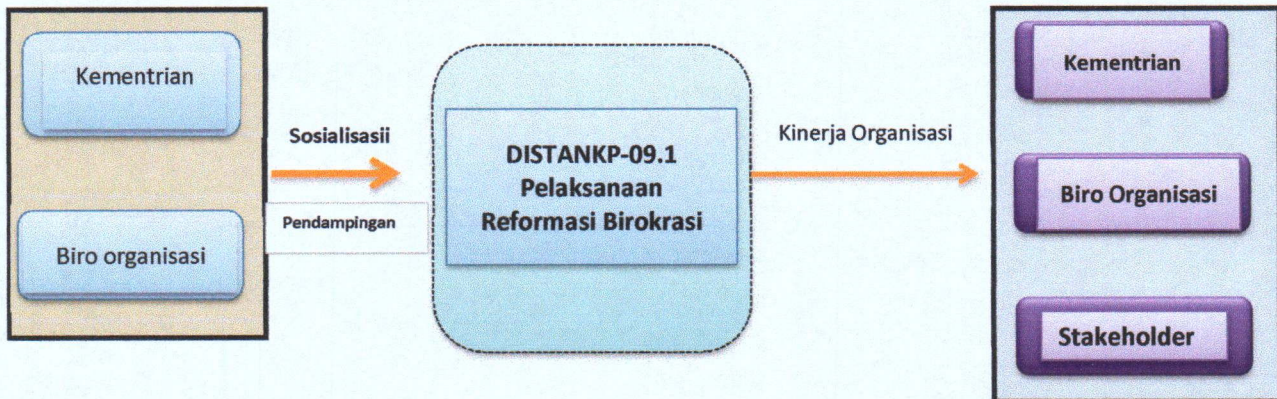
**PETA SUB PROSES  
DISTANKP - 07. PERENCANAAN DAN KEUANGAN**



**PETA SUB PROSES  
DISTANKP - 08. PENGAWASAN INTERNAL**

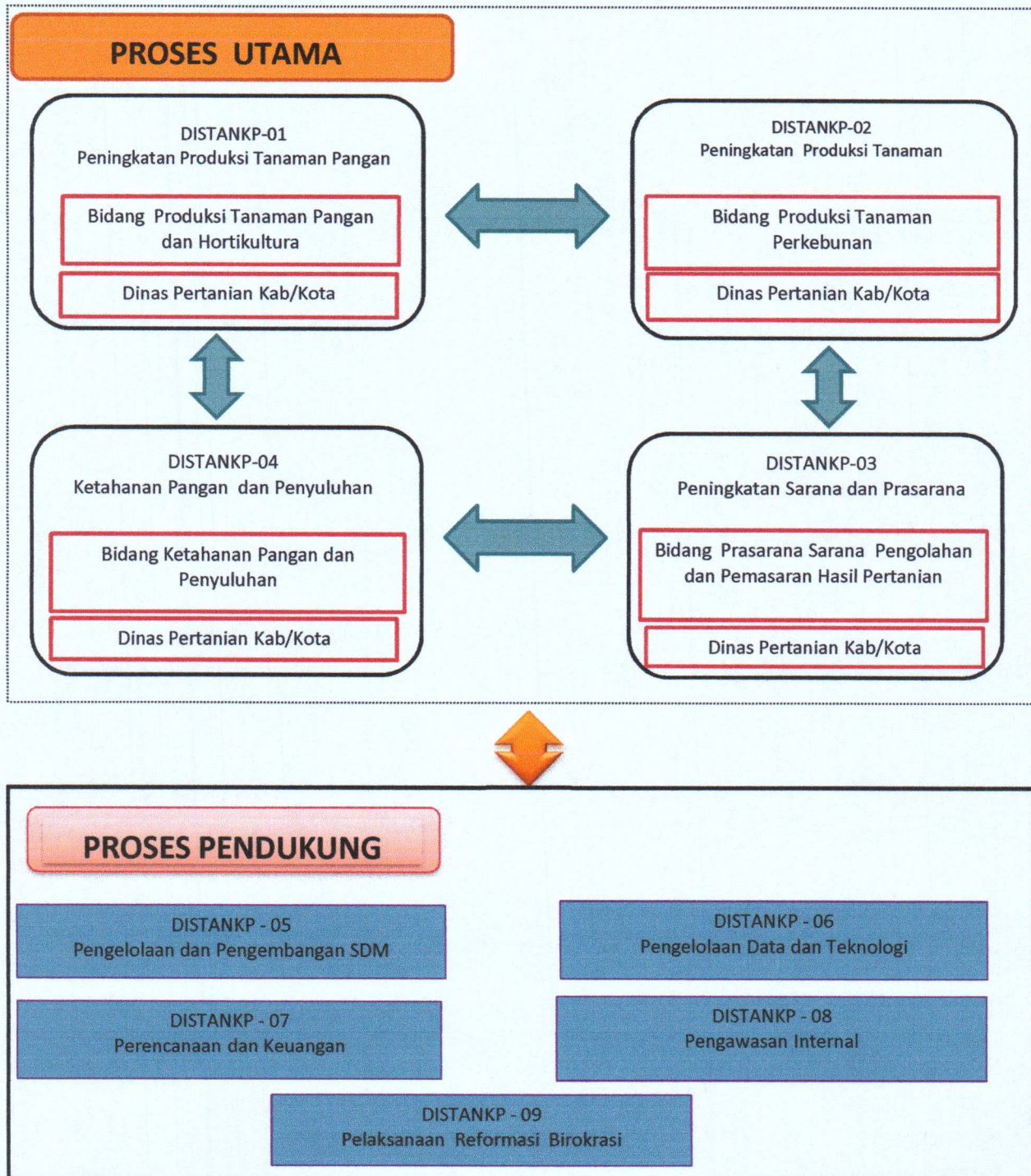


**PETA SUB PROSES  
DISTANKP - 09. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**



## C. PETA RELASI

Peta Relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak - pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

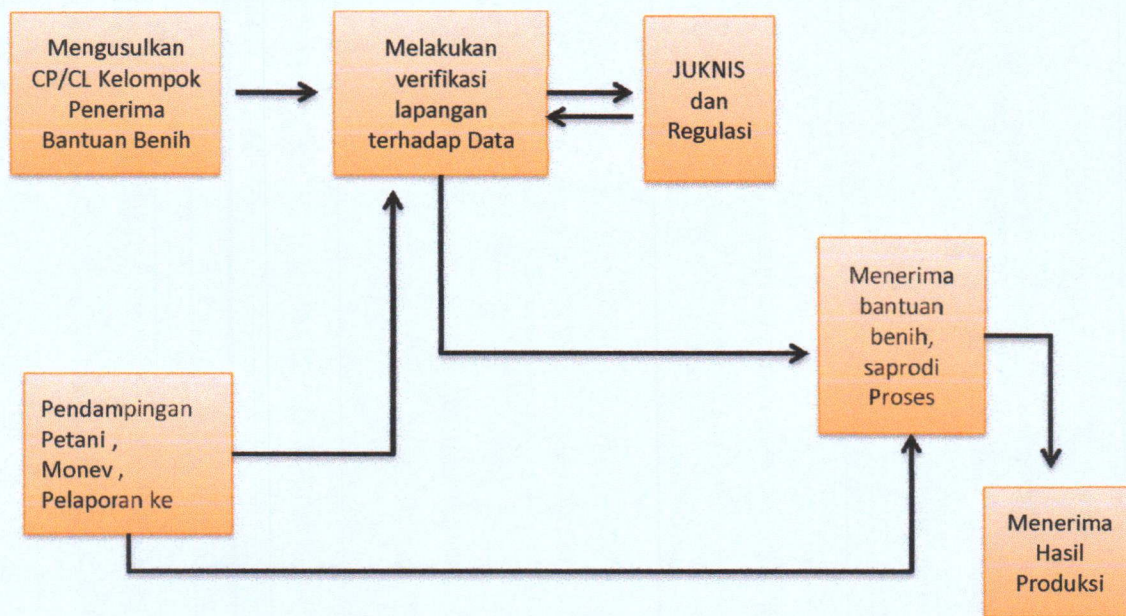


## D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

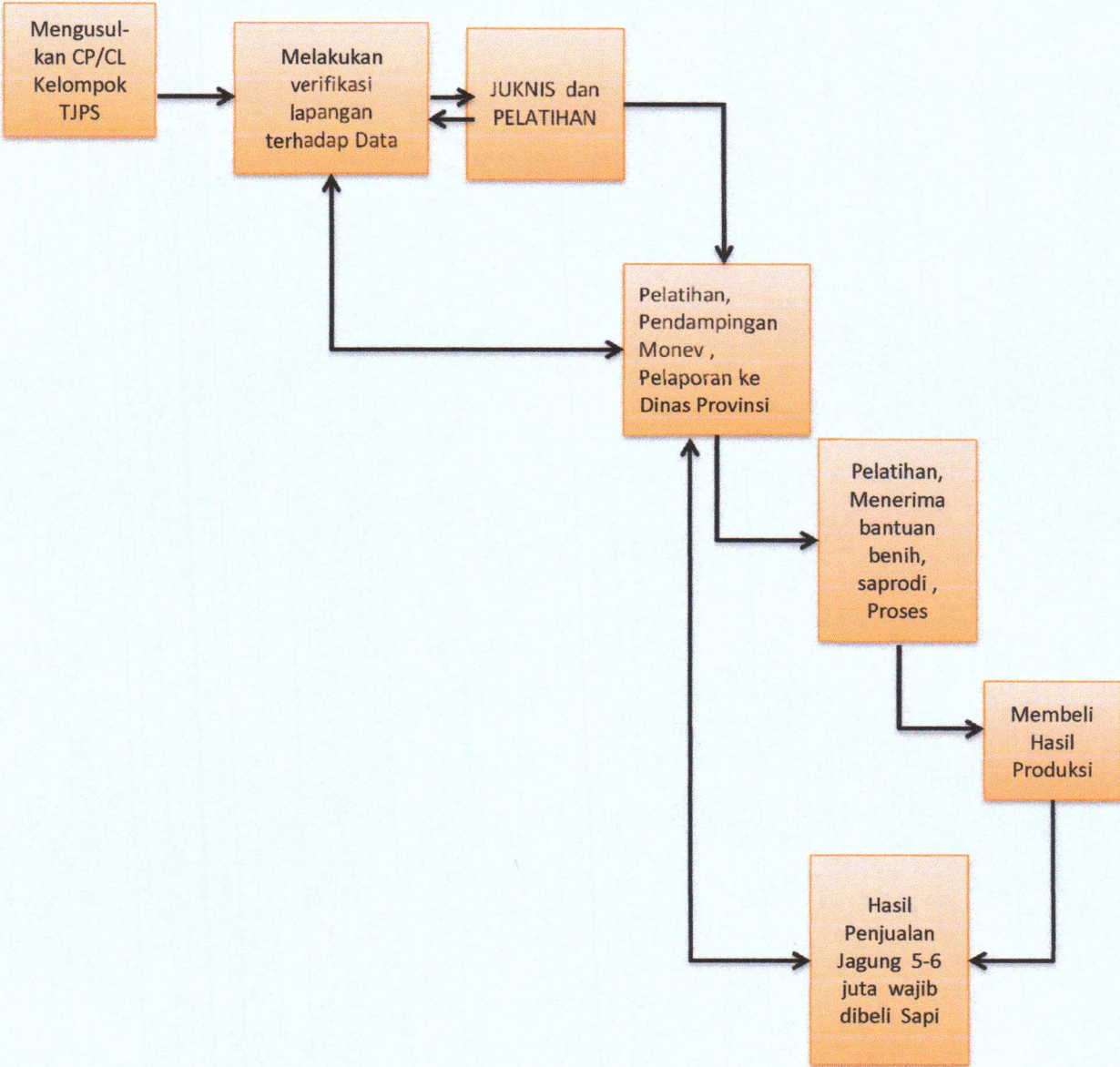
### DISTANKP-01.01.a. PENINGKATAN PRODUKSI SEREALIA

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementrian Pertanian	Kelompok Tani	Investor dan UMKM
--------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------



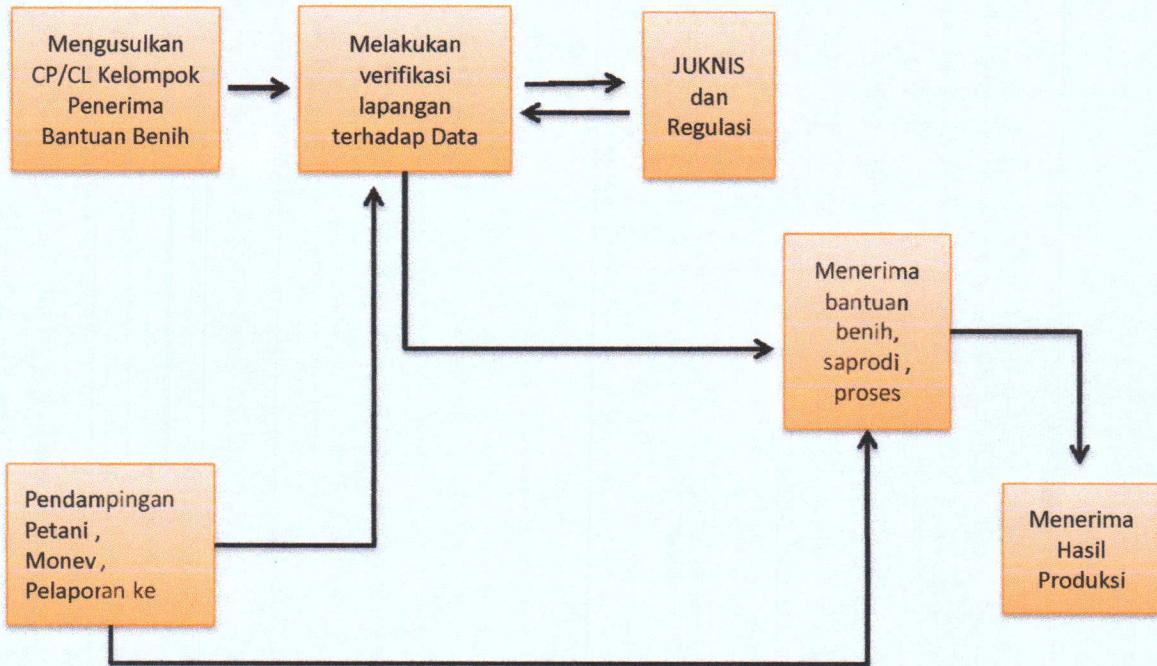
**DISTANKP-01.01.b. TANAM JAGUNG PANEN SAPI (TJPS)**

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tim Ahli TJPS	Pendamping TJPS	Kelompok Tani	Investor dan UMKM
--------------------------	---	---------------	-----------------	---------------	-------------------



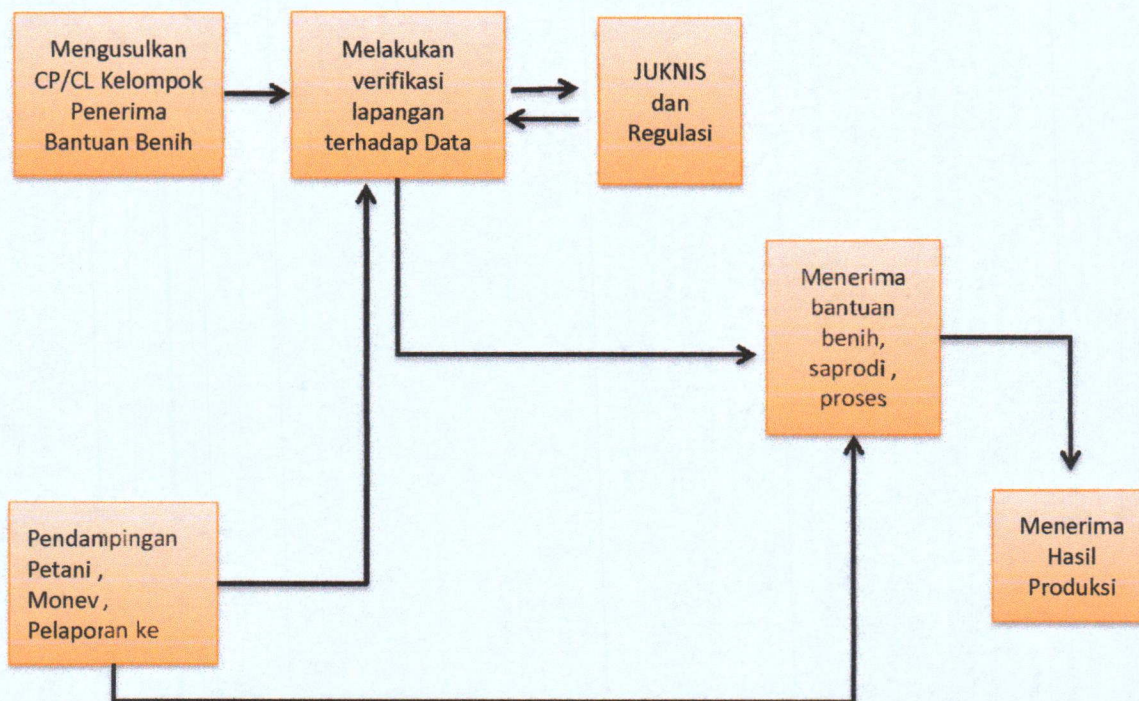
## DISTANKP-01.2 . PENINGKATAN PRODUKSI KACANG-KACANGAN

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementrian Pertanian	Kelompok Tani	Investor dan UMKM
--------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------



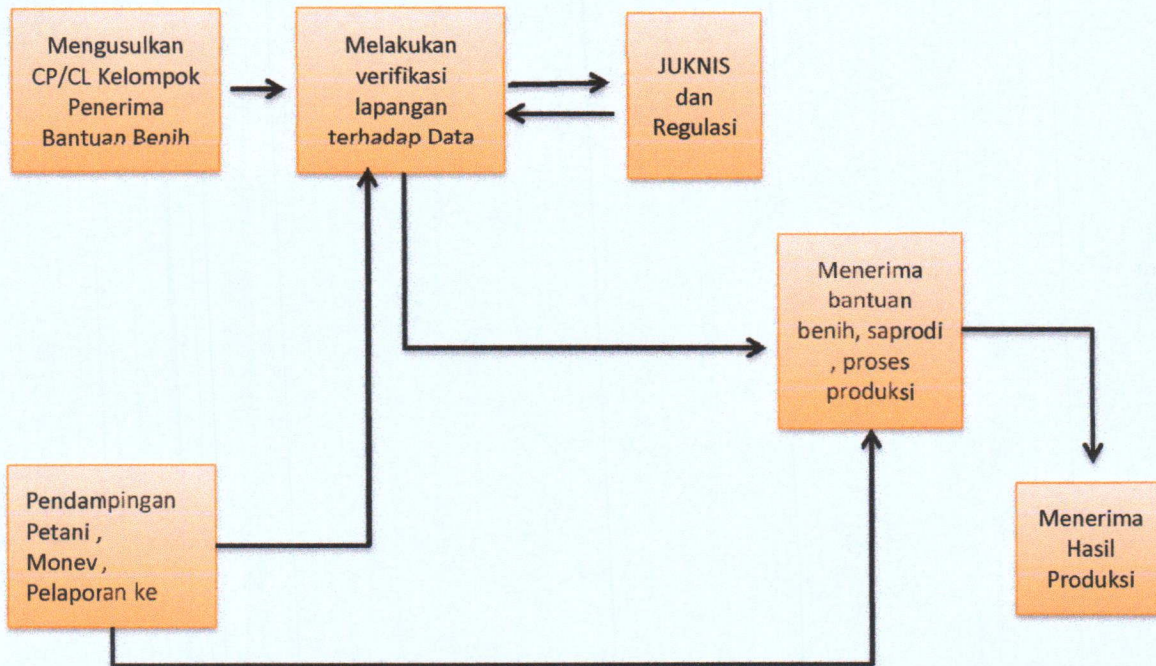
### DISTANKP-01.3. PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementrian Pertanian	Kelompok Tani	Investor dan UMKM
-----------------------------	---	-------------------------	---------------	----------------------



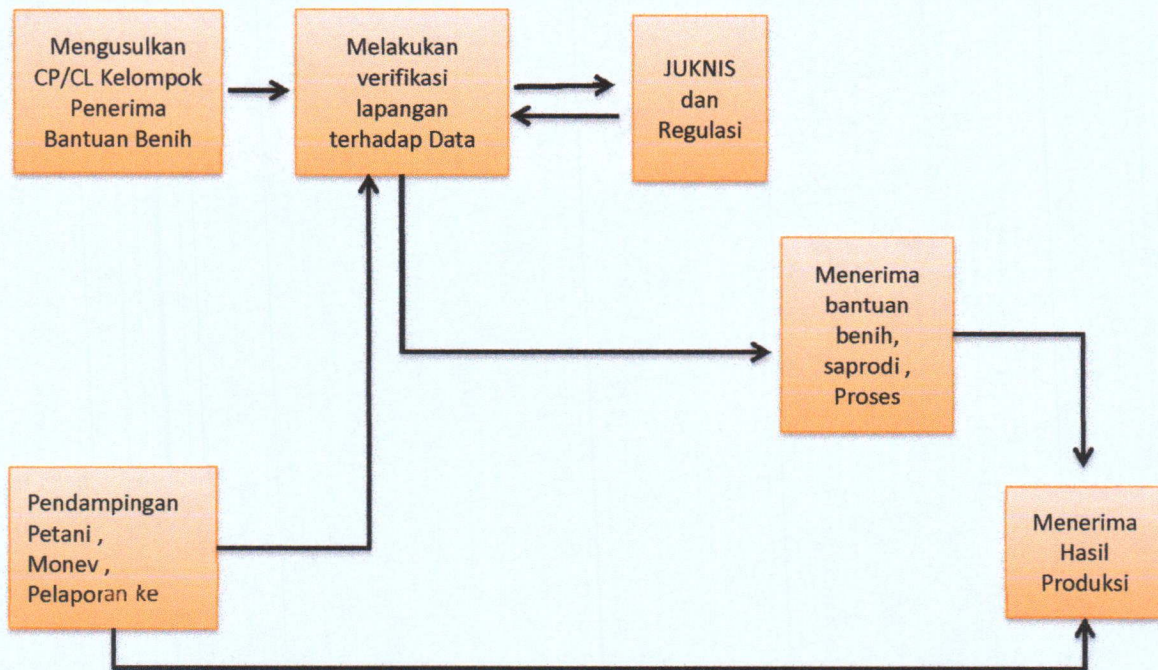
## DISTANKP-02.1 . PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN TAHUNAN

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementrian Pertanian	Kelompok Tani	Investor dan UMKM
--------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------



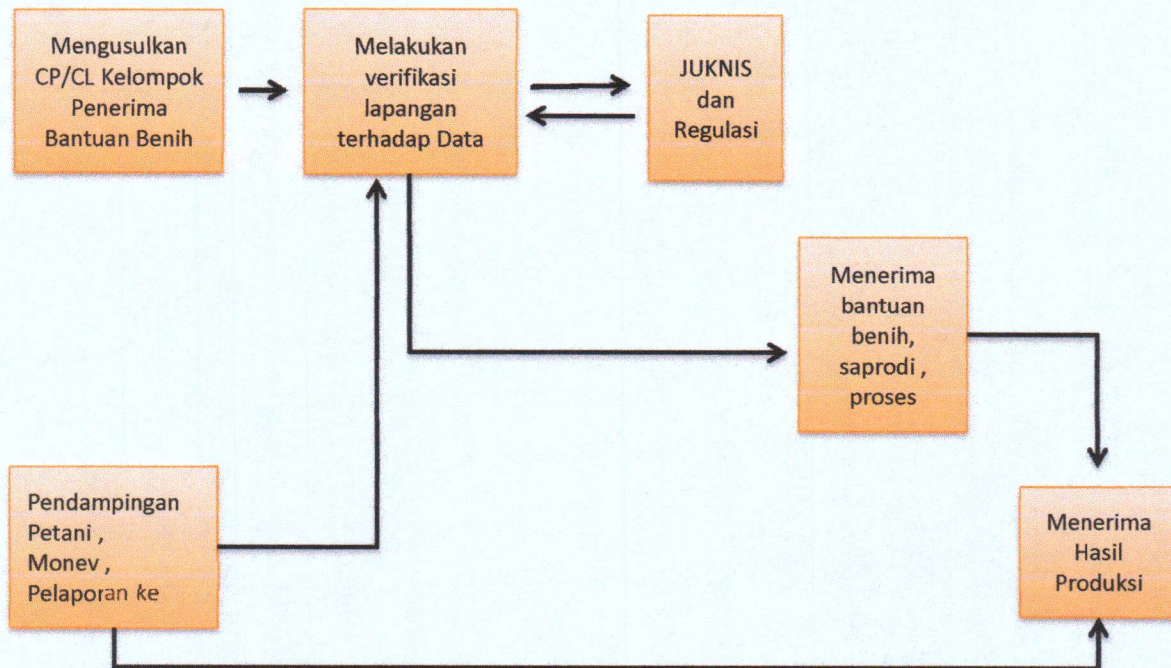
## DISTANKP-02.2. PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN SEMUSIM

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementerian Pertanian	Kelompok Tani	Investor dan UMKM
--------------------------	---	-----------------------	---------------	-------------------



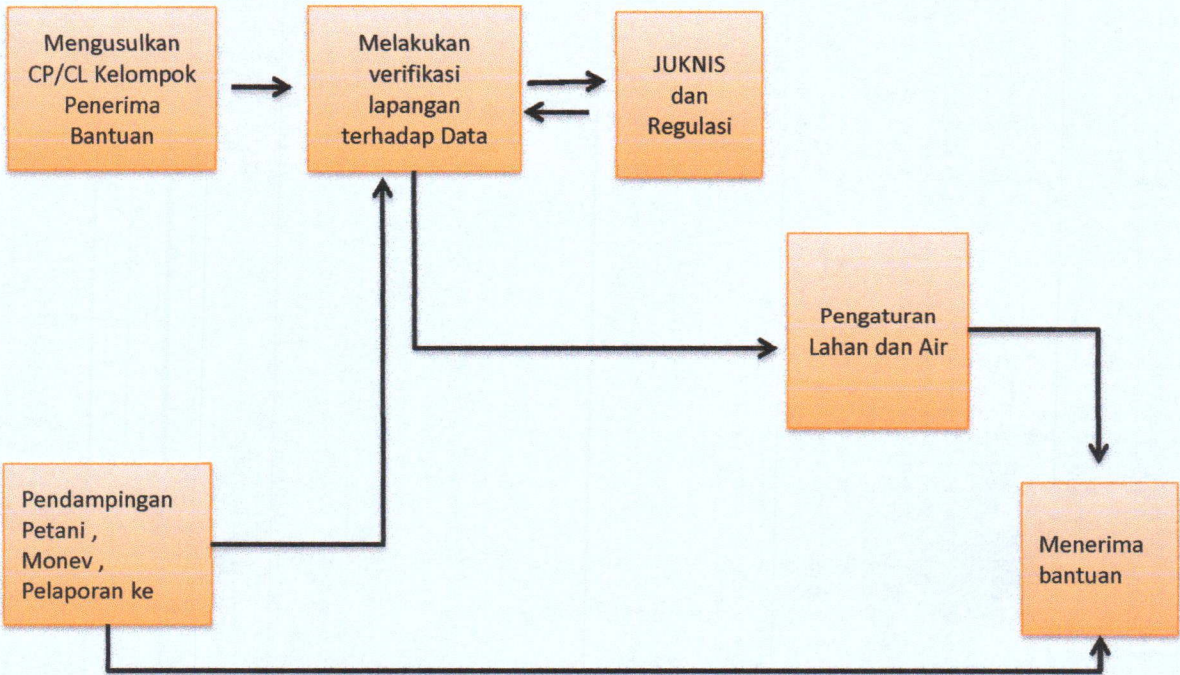
### DISTANKP-02.3 . PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementerian Pertanian	Kelompok Tani	Investor dan UMKM
--------------------------	---	-----------------------	---------------	-------------------



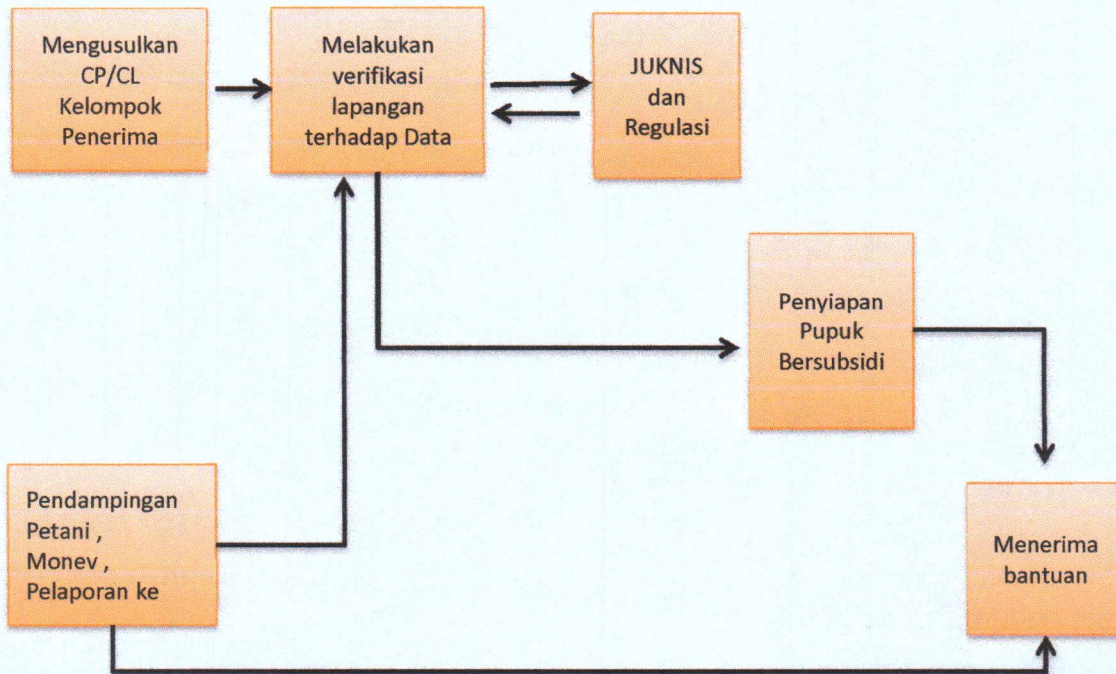
**DISTANKP-03.1 . PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR**

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementerian Pertanian	Kelompok P3A	Kelompok Tani
--------------------------	---	-----------------------	--------------	---------------



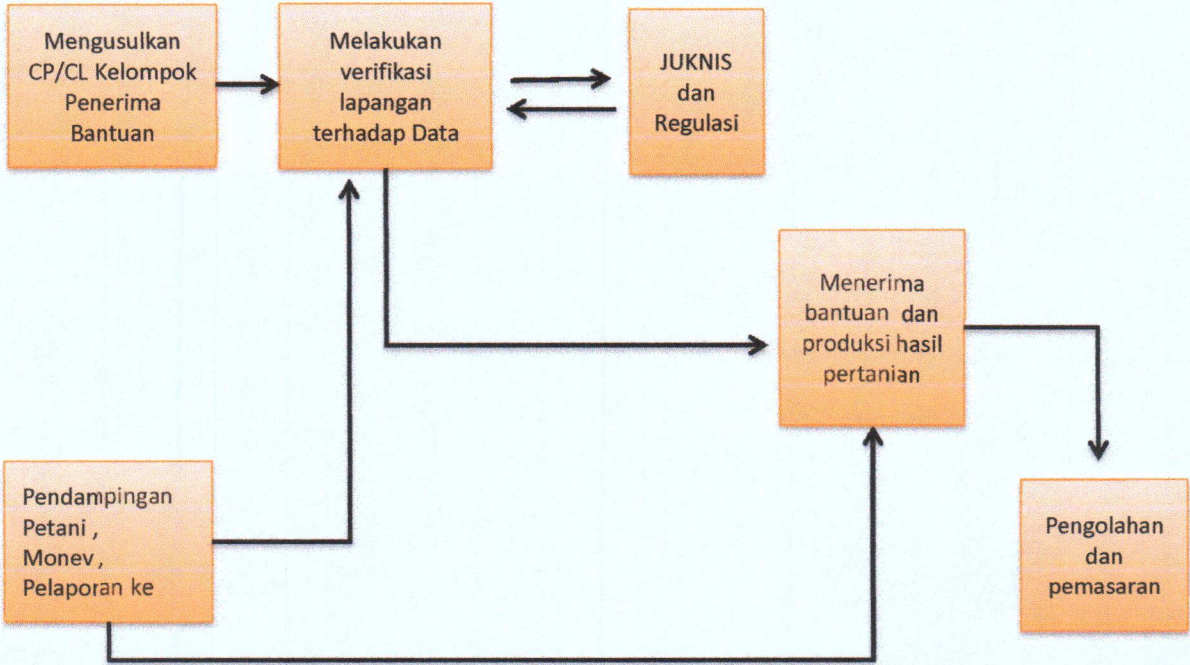
### DISTANKP-03.2. PENGELOLAAN PUPUK, PESTISIDA, ALSINTAN

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementrian Pertanian	Pengecer Pupuk	Kelompok Tani
--------------------------	---	----------------------	----------------	---------------



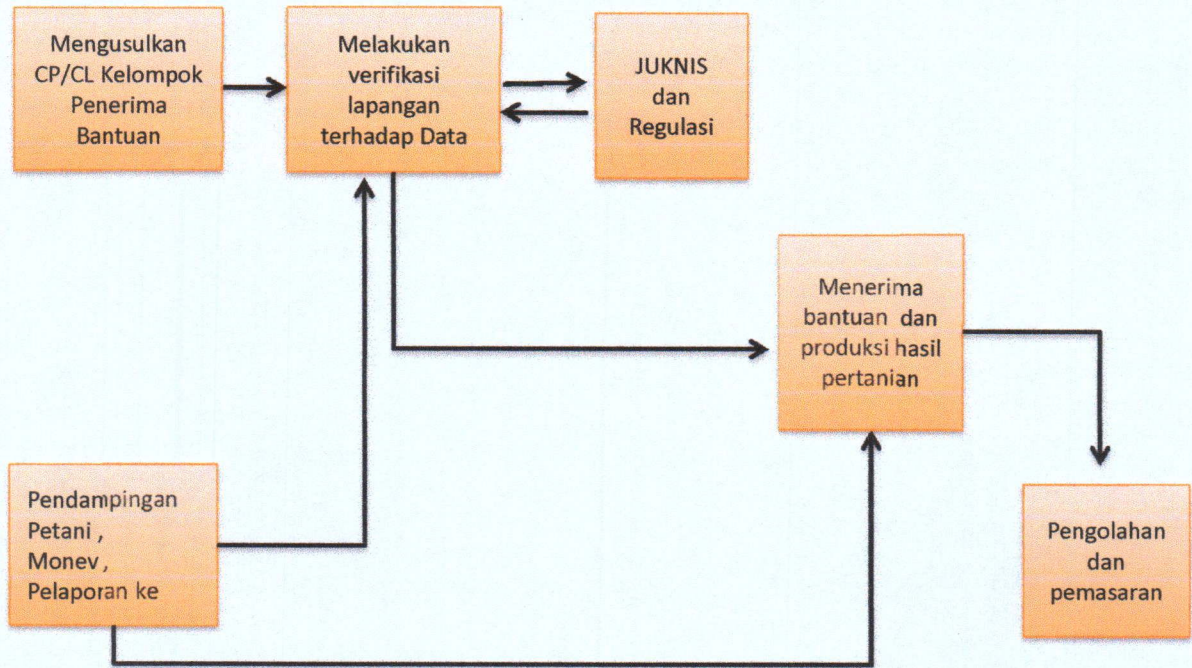
**DISTANKP-03.3. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN**

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Kementerian Pertanian	Kelompok Tani	UMKM
--------------------------	---	-----------------------	---------------	------



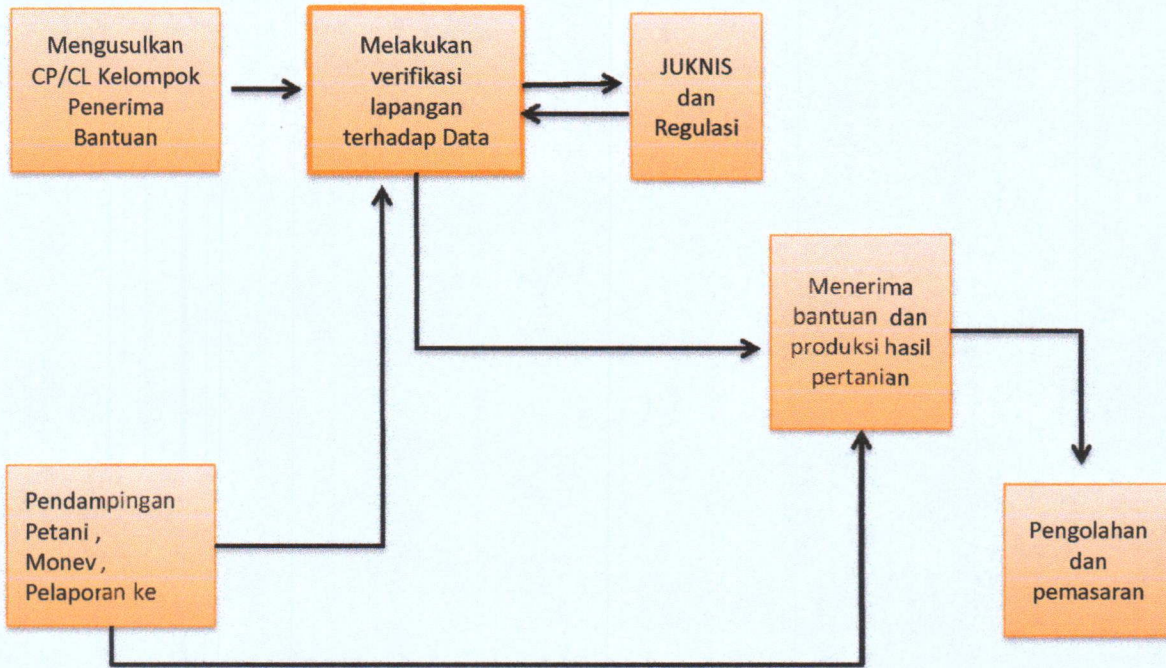
**DISTANKP-04.1. KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Badan Ketahanan Pangan	Kelompok Tani	UMKM
--------------------------	---	------------------------	---------------	------



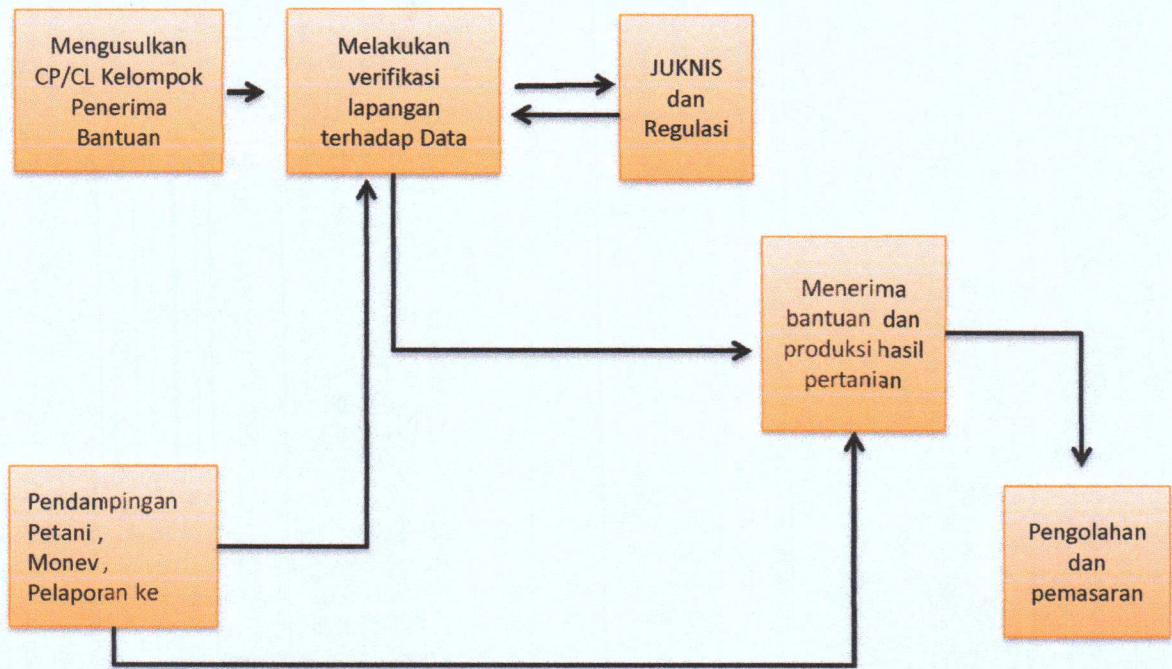
## DISTANKP-04.2. KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Badan Ketahanan Pangan	Kelompok Tani	UMKM
--------------------------	---	------------------------	---------------	------



**DISTANKP-04.3. PENYULUHAN**

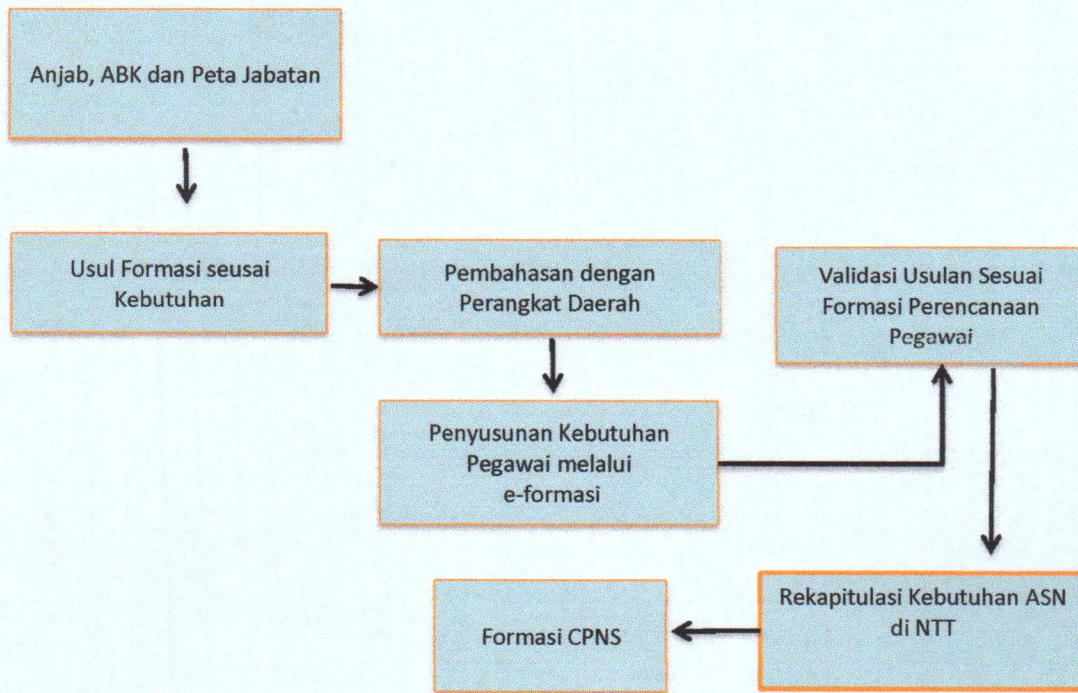
Dinas Pertanian Kab/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Penyuluh Kab/Kota	Kelompok Tani	UMKM
--------------------------	---	-------------------	---------------	------



6

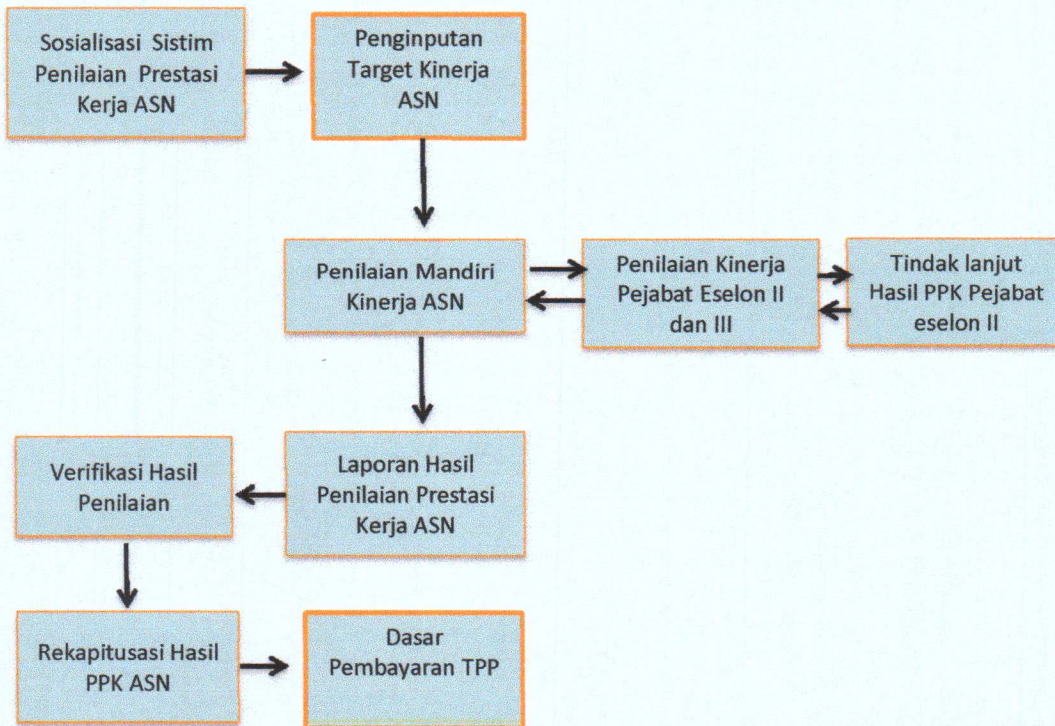
## DISTANKP-05.1. PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

DISTANKP Prov. NTT	BKD	Kementrian PAN RB
--------------------	-----	-------------------



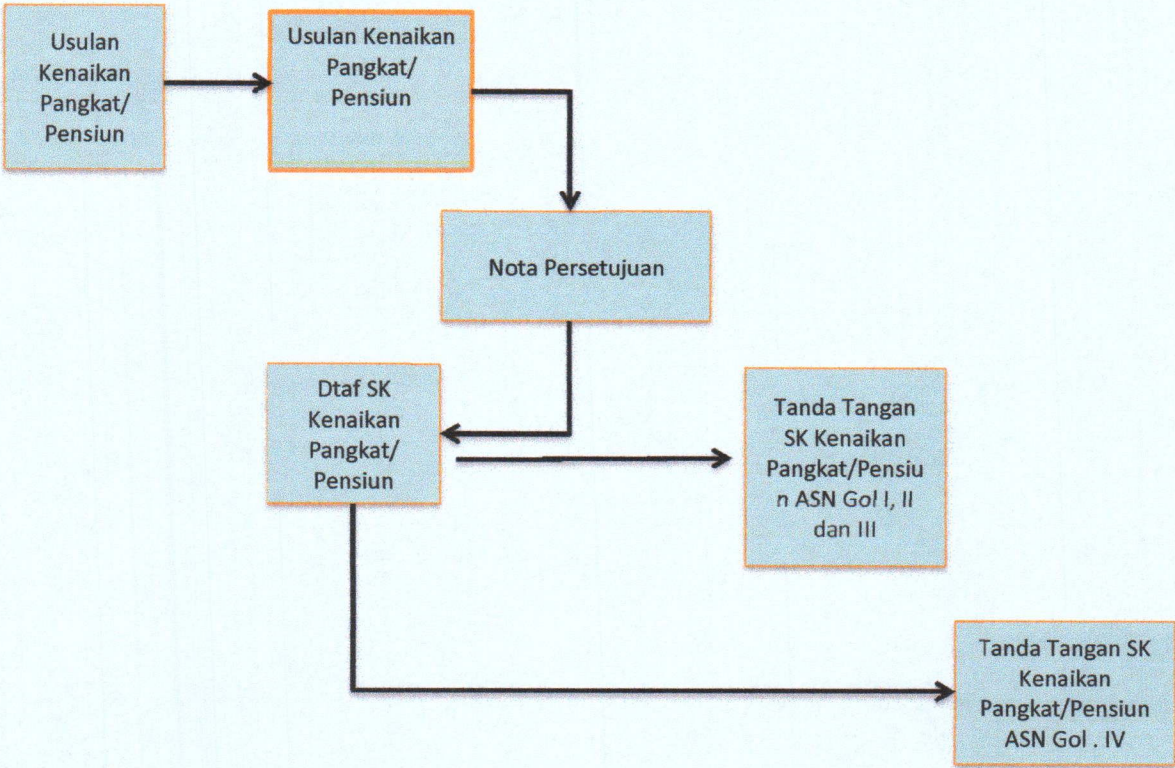
## DISTANKP-05.2. PENILAIAN PRESTASI KERJA

BKD	DISTANKP Prov. NTT	Sekretaris Daerah	Gubernur
-----	--------------------	-------------------	----------



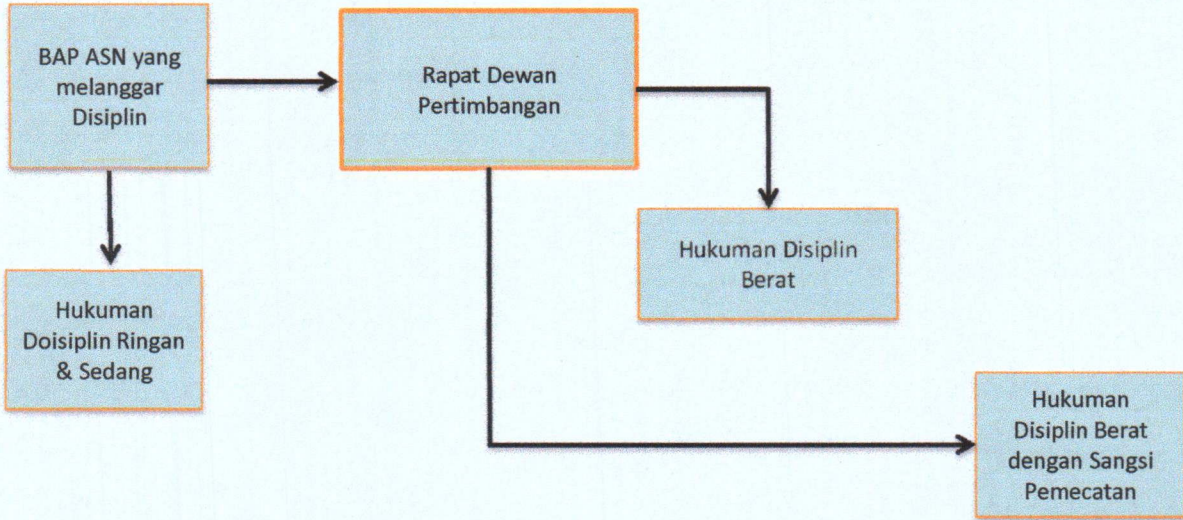
**DISTANKP-05.3. KENAIKAN PANGKAT / PENSUN ASN**

DISTANKP Prov. NTT	BKD	BKN	Sekretaris Daerah	Gubernur
--------------------	-----	-----	-------------------	----------

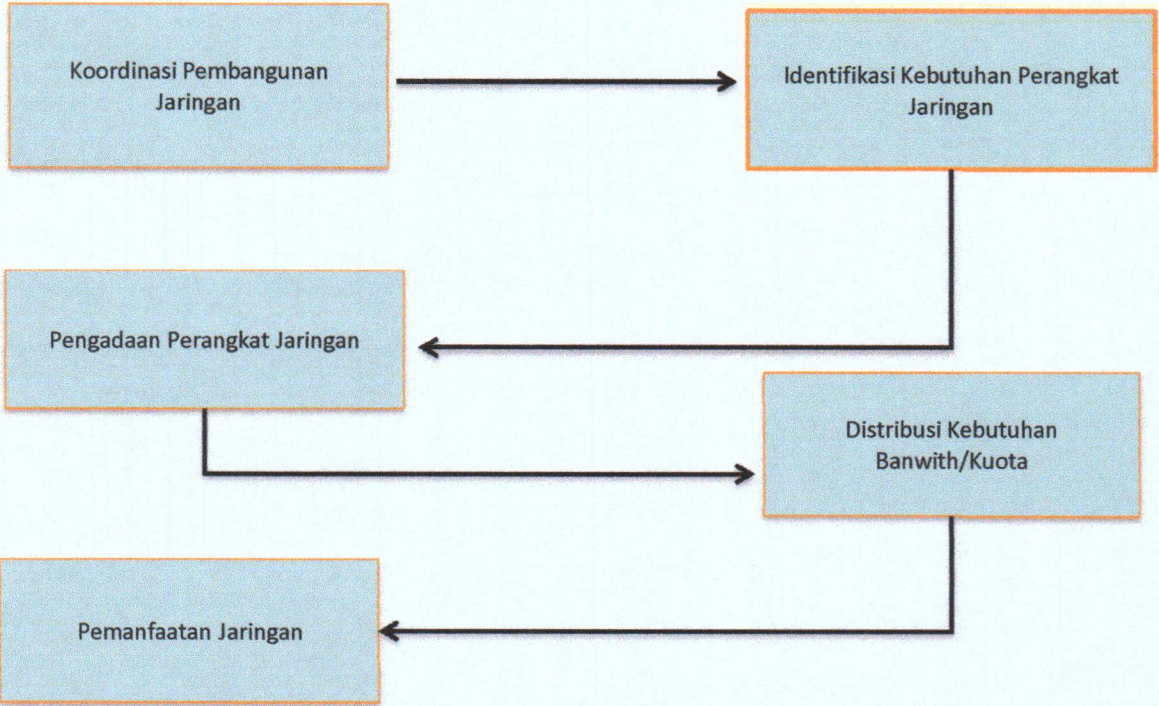
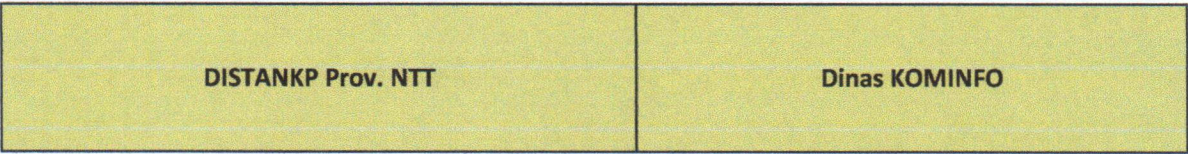


**DISTANKP-05.4. DISIPLIN PEGAWAI**

DISTANKP Prov. NTT	BKD	Sekretaris Daerah	Gubernur
--------------------	-----	-------------------	----------

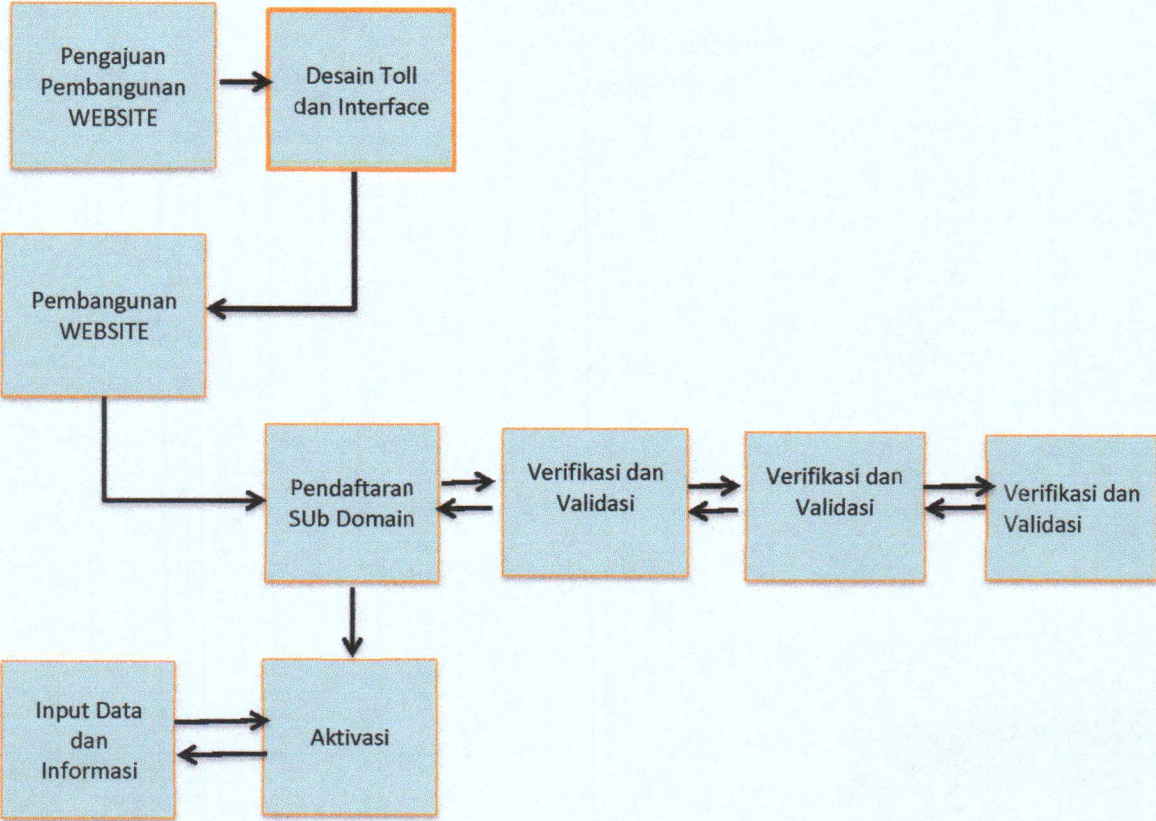


**DISTANKP-06.1. PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN**



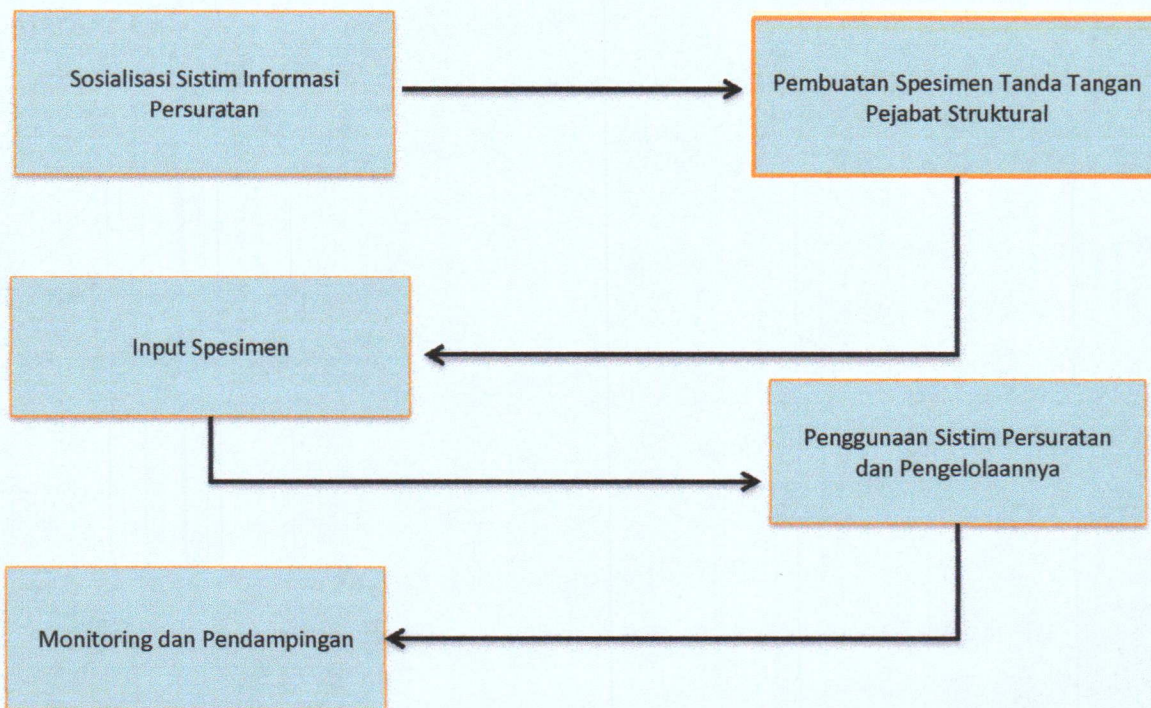
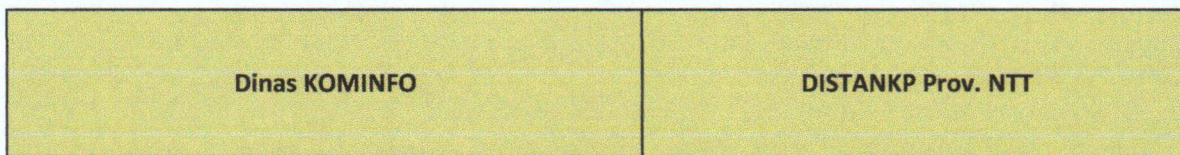
**DISTANKP-06.2. PENGELOLAAN WEBSITE**

DISTANKP Prov. NTT	Dinas KOMINFO	Kementrian KONINFO	Kementrian PAN RB	Badan Siber dan Sandi Negara
--------------------	---------------	--------------------	-------------------	------------------------------



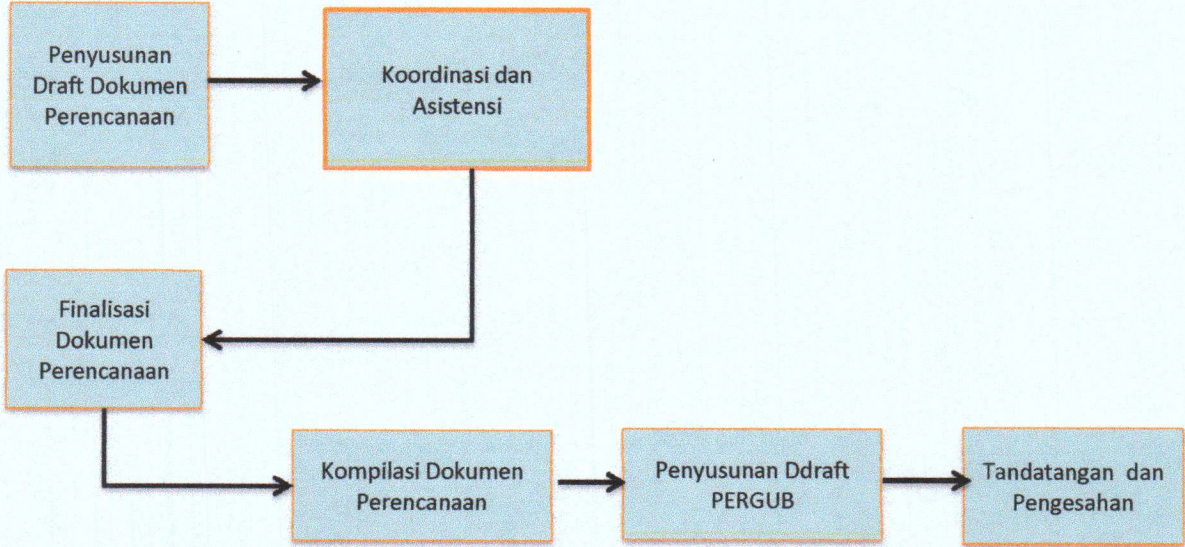
f

### DISTANKP-06.3. PENGELOLAAN APLIKASI PERSURATAN



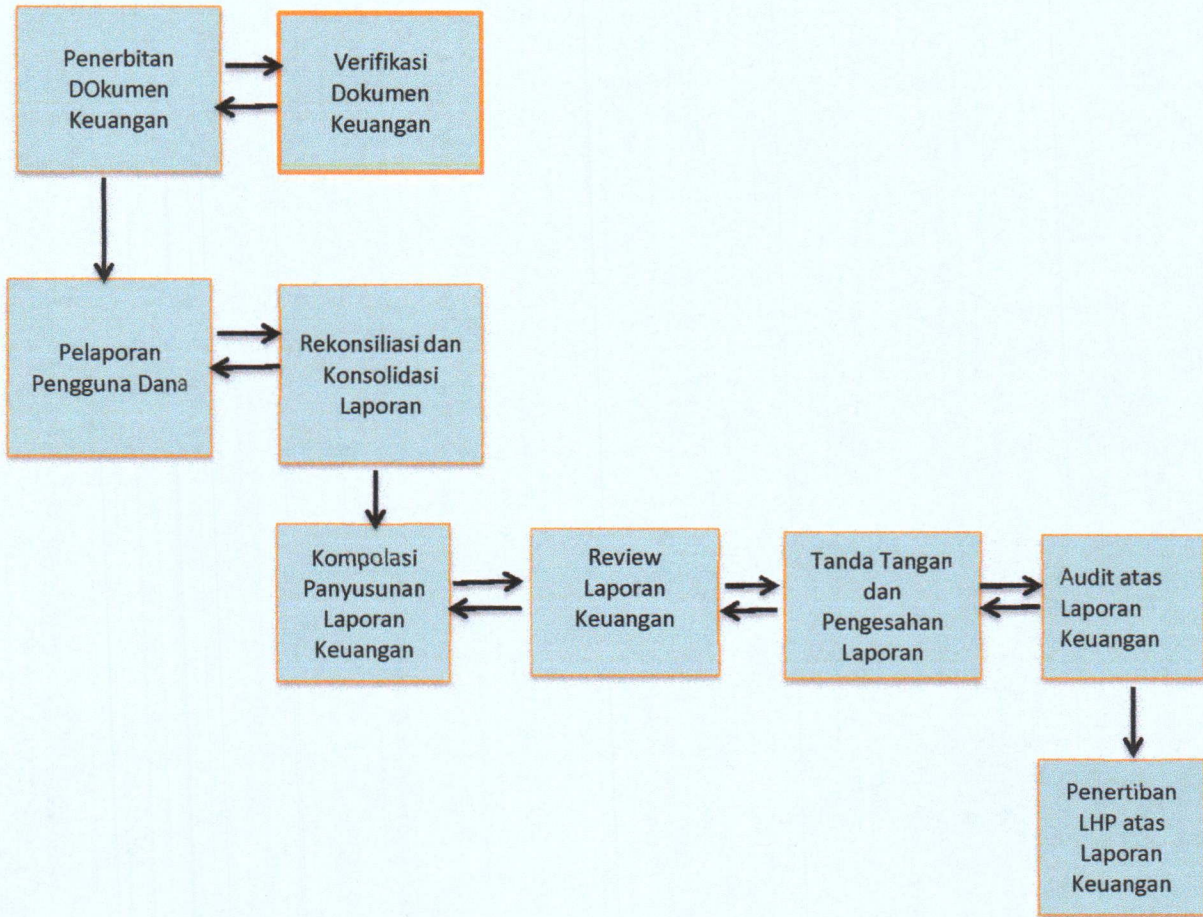
**DISTANKP-07.1. PERENCANAAN**

DISTANKP Prov. NTT	BAPELITBANGDA	Sekretaris Daerah	Gubernur
--------------------	---------------	-------------------	----------



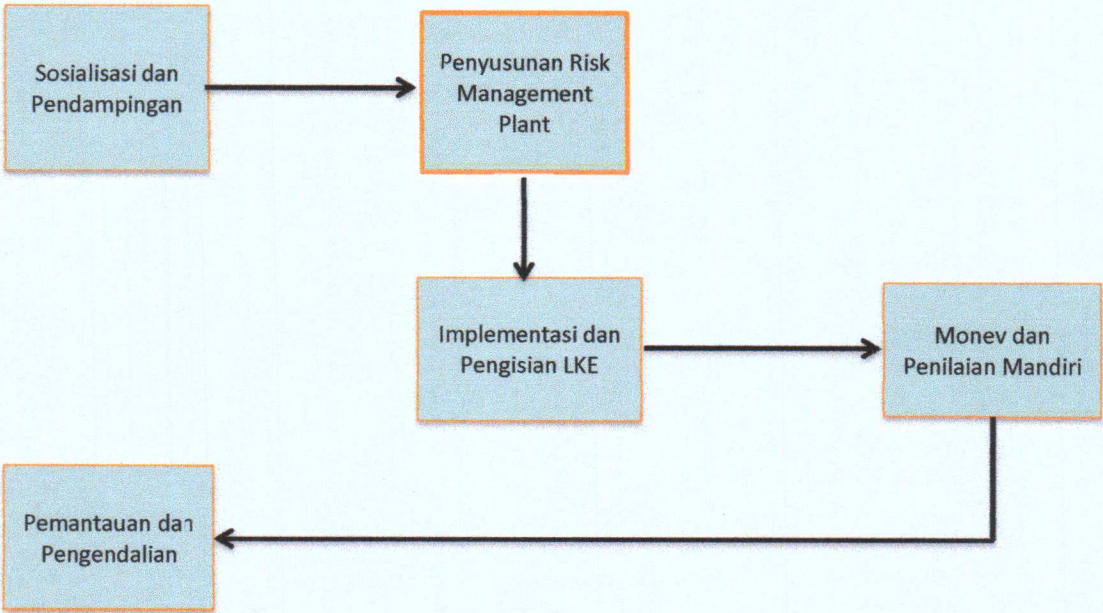
**DISTANKP-07.2. PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

DISTANKP Prov. NTT	Badan Keuangan Daerah	Inspektorat Daerah	GUBERNUR	BPK
--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----



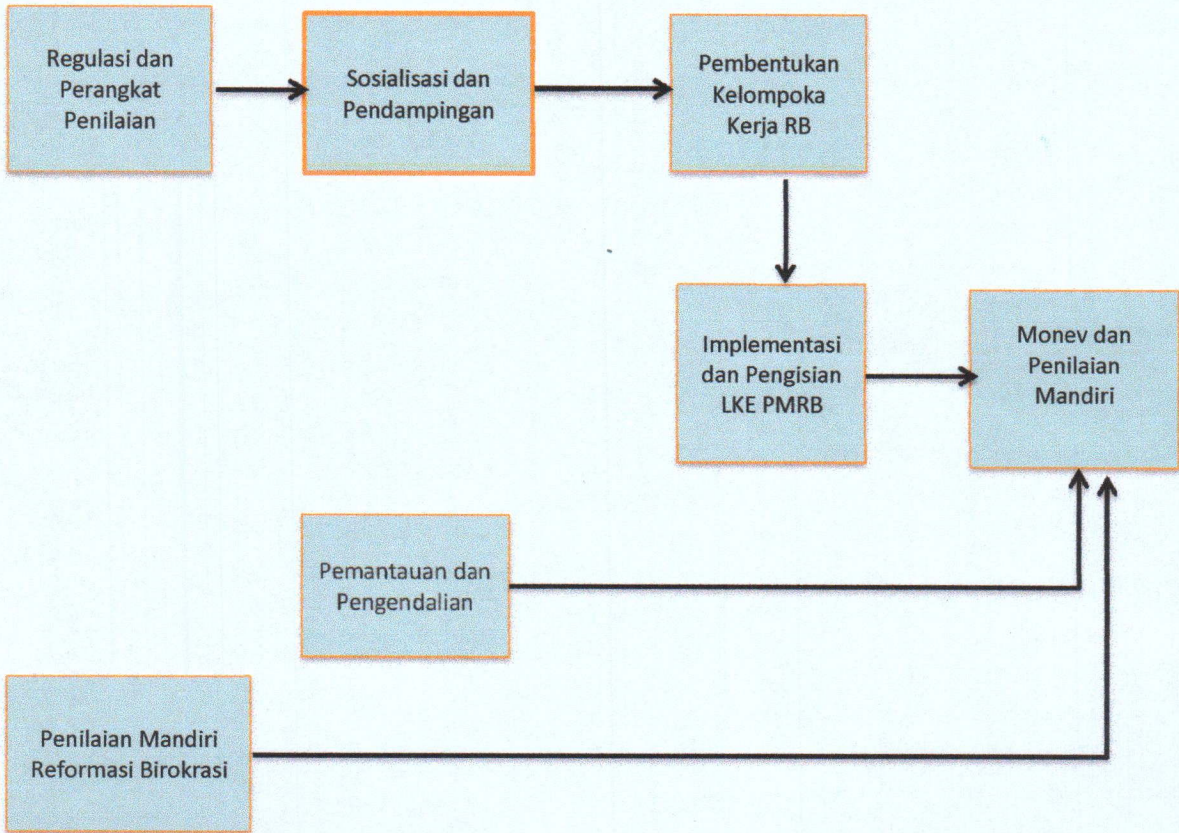
**DISTANKP-08.1. PELAKSANAAN SPIP**

SATGAS SPIP	DISTANKP Prov. NTT	Asesor SPIP
-------------	--------------------	-------------



**DISTANKP-09.1. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Kementrian PAN RB	Biro Organisasi	DISTANKP Prov. NTT	Asesor Reformasi Birokrasi
-------------------	-----------------	--------------------	----------------------------



6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
*VB*  
 Re VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

7